



**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH KERAJINAN ANYAMAN BAMBU DESA
GINTANGAN KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN
BANYUWANGI**

*Empowerment of Micro, Small, and Medium-sized Businesses of Bamboo
Woven Handycraft in Gintangan Village, Blimbingsari District, Banyuwangi
Regency*

SKRIPSI

Oleh

**Hilda Khoirul Umroh
NIM 150910201014**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH KERAJINAN ANYAMAN BAMBU DESA
GINTANGAN KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Hilda Khoirul Umroh
NIM 150910201014**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tua saya, Bapak Boyadi dan Ibu Siti Munawaroh yang telah memotivasi, mendoakan, memberikan bantuan secara materiil maupun non materiil hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. kedua kakak kandungku, Anis Watul Fitria dan Arif Mustofa serta kedua kakak iparku, Agus Mulyawan dan Nirmala Dyah Utami yang telah mendoakan dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi;
3. kedua keponakan saya, Axelle Rekha Mulyawan dan Rafka Arsakha Mulyawan yang telah menghadirkan canda tawa, menghibur saya dikala sedang bosan mengerjakan skripsi;
4. guru-guruku sejak taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA) yang telah dengan sabar dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada saya;
5. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terutama dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing dan membantu saya dalam belajar, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya, dan
6. Almamater yang selalu saya banggakan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

*Leaders become great, not because of their power, but because of their ability to empower others.*¹

(Peter Shepherd)

Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita

(terjemahan QS. At Taubah:40)ⁱⁱ

¹ Sepherd, Peter. 2019. My Favorite Inspiring Quotes Empower Other People. <https://trans4mind.com/quotes/empower-others.html> diakses pada tanggal 3 September 2019.

ⁱⁱ Departemen Agama Republik Indonesia .1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir Al-Qur'an

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilda Khoirul Umroh

NIM : 150910201014

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kerajinan Anyaman Bambu Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 September 2019

Yang menyatakan

Hilda Khoirul Umroh

NIM 150910201014

SKRIPSI

**“PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH KERAJINAN ANYAMAN BAMBU DESA
GINTANGAN KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN
BANYUWANGI”**

Oleh

Hilda Khoirul Umroh

NIM 150910201014

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kerajinan Anyaman Bambu Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Rabu, 2 Oktober 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP. 195805101987022001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D

NIP 196102131988021001

Drs. Anwar, M.Si

NIP 196306061988021001

Anggota III,

Anggota IV,

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP

NIP 197410072000121001

Hermanto Rohman, S.Sos., MPA

NIP 197903032005011001

Mengesahkan,

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kerajinan Anyaman Bambu Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi; Hilda Khoirul Umroh, 150910201014; 2019: 114 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemberdayaan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan. UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan merupakan UMKM unggulan desa dan hasil produknya sudah dikenal oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, namun dalam pengembangan usahanya terdapat kendala yang dihadapi yakni berkaitan dengan manajemen keuangan dan tenaga kerja. Berkaitan dengan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM dijelaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan wewenang untuk memberdayakan UMKM. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang ditunjuk untuk memberdayakan UMKM yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut mengalami kendala pada kurang meratanya kegiatan pemberdayaan yang dijalankan, kondisi ini bertolak belakang pada kewajiban dan wewenang pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM sebagaimana tercantum pada Perda tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah kegiatan pemberdayaan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi. Data yang digunakan adalah kata-kata dengan metode wawancara terhadap informan dengan cara bertatap muka, dan sumber tertulis melalui dokumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer sumber data sekunder. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive*. Data yang telah didapatkan kemudian dicek keabsahannya dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Data yang telah lulus cek keabsahan, kemudian disajikan dan dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan, tahap ini dilakukan melalui kegiatan Musrenbangdes. Pelaku UMKM mengusulkan kebutuhannya terkait dengan pengembangan usahanya. Usulan awal Musrenbangdes tersebut kemudian berlanjut hingga Musrenbangkab, pada tahap ini BAPPEDA menentukan pihak pemberdaya yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan kegiatan dari hasil usulan yang sudah disetujui mulai Musrenbangdes hingga Musrenbangkab sesuai dengan prioritas kebutuhan. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi atau pendampingan. Pada tahap ketiga ini sasaran pemberdayaan setelah mendapat kediatan pemberdayaan tetap dipantau terkait dengan pengembangan usahanya bila ada kendala maupun kemajuan yang didapatkan.

Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa bentuk yakni pelatihan pembuatan anyaman, pelatihan peningkatan kelembagaan, manajemen usaha akuntansi dan pengembangan usaha, pelatihan pemasaran *online* bagi UMKM, pemasaran melalui *event* Banyuwangi Festival, klinik Usaha Mikro, dan rumah kreatif. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilaksanakan langsung pada UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan dengan tujuan untuk menambah kemampuan serta kemandirian pelaku UMKM. Pada kegiatan pemberdayaan tersebut, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala pemberdayaan pada UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan yaitu pembiayaan atau modal yang tidak difasilitasi oleh pihak pemberdaya, sumber daya manusia yang kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan, perencanaan yang kurang baik yang berdampak pada kurang meratanya kegiatan pemberdayaan di UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan. Adapun manfaat dari kegiatan pemberdayaan tersebut yakni meningkatkan manajerial usaha UMKM, peningkatkan promosi produk, dan sebagai strategi pemberdayan UMKM di lokasi pemberdaya lainnya.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT selalu dipanjatkan, karena dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kerajinan Anyaman Bambu Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama penulis kuliah;
5. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan sabar memberikan arahan, masukan, saran, waktu dan sikap beliau yang penuh semangat serta keyakinan yang tinggi, menjadikan penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing penulis dengan sabar dalam penyusunan tugas akhir;
7. seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. tim penguji yang telah berbagi waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini;

9. seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
10. Kepala Desa Gintangan Ibu Rusdianah, Sekretaris Desa Gintangan Bapak Bastomi, dan juga Perangkat Desa Gintangan Bapak Umar dan Bapak Rony Hidayat yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan membantu dalam keberhasilan penelitian;
11. Staff Bagian Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan, Mas Bayu Widya Handycraft, Ibu Suparti Cindy Ayu Handycraft, Bapak Amanto Karya Nyata Handycraft, Bapak Untung Aulia Handycraft, dan Ibu Wiwik Handycraft yang telah memberikan ijin penelitian dan memberikan informasi maupun data sebagai bahan penyusunan skripsi ini;
13. Ryan Adha Anindita beserta keluarga yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. sahabat PENA. Icha, Indah, Nafiatus, Merry, Tessa, Nanda, dan Ello yang telah memberikan semangat dan doa serta sebagai teman diskusi selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini;
15. teman-teman sekolah sejak taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA) yang telah memotivasi demi selesainya tugas akhir ini;
16. teman-teman kuliah di Program Studi Administrasi Negara 2015 yang telah membantu doa, memotivasi dan memberikan solusi dalam penulisan tugas akhir ini;
17. seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Segala kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini.

Jember, 04 September 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Bagi Peneliti.....	12
1.4.2 Bagi Masyarakat dan Pemerintah.....	12
1.4.3 Bagi Akademis.....	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Administrasi Publik	13
2.1.1 Definisi Administrasi.....	13
2.1.2 Definisi Administrasi Publik.....	14
2.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi	16

2.3 Pemberdayaan	19
2.3.1 Definisi Pemberdayaan	19
2.3.2 Sasaran Pemberdayaan.....	20
2.3.3 Model-model Pemberdayaan.....	20
2.3.4 Tahap-tahap Pemberdayaan	22
2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	24
2.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	27
2.6 Kerajinan Tangan	30
2.7 Penelitian Terdahulu	33
2.8 Kerangka Berpikir	37
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Situasi Sosial	40
3.4 Desain Penelitian	41
3.4.1 Fokus Penelitian	42
3.4.2 Penentuan Informan Penelitian	42
3.4.3 Data Dan Sumber Data	43
3.5 Teknik Dan Alat Perolehan Data.....	44
3.5.1 Observasi.....	44
3.5.2 Wawancara.....	45
3.5.3 Dokumentasi.....	46
3.5.4 Triangulasi.....	46
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
3.7 Teknik Penyajian Dan Analisis Data	48
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil.....	50
4.1.1 Gambaran Umum UMKM Kabupaten Banyuwangi dan Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

dalam Pemberdayaan UMKM	50
A. Gambaran Umum UMKM Kabupaten Banyuwangi	50
B. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi dalam Pemberdayaan UMKM.....	55
4.1.2 Gambaran Umum UMKM Kecamatan Blimbingsari.....	62
4.1.3 Gambaran Umum UMKM Desa Gintangan	
A. Kondisi Umum UMKM Gintangan	65
B. Aspek Kelembagaan UMKM kerajinan Anyaman bambu Desa Gintangan.....	67
C. Aspek Produktifitas UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan.....	69
4.1.4 Pemberdayaan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan	72
A. Tahap-tahap Pemberdayaan.....	72
B. Bentuk-bentuk Pemberdayaan	80
C. Kendala Pemberdayaan	90
D. Manfaat Pemberdayaan	93
4.2 Pembahasan.....	95
4.2.1 Tahap-tahap Pemberdayaan	95
4.2.2 Bentuk-bentuk Pemberdayaan.....	99
4.2.3 Kendala Pemberdayaan.....	103
4.2.4 Manfaat Pemberdayaan.....	106
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	110
 DAFTAR PUSTAKA	111

LAMPIRAN 115



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Banyuwangi	2
1.2 Jumlah kekayaan dan hasil penjualan tahunan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan	3
1.3 Daftar pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan.....	4
1.4 Daftar UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan yang mendapat kegiatan pemberdayaan.....	6
2.1 Penelitian terdahulu	33
4.1 Jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Banyuwangi, tahun 2017	53
4.2 Sektor pekerjaan dan jumlah pekerja tahun 2018.....	63
4.3 Jenis industri kecil/ rumah tangga di Kecamatan Blimbingsari, tahun 2017	64
4.4 Luas wilayah Desa Gintangan menurut penggunaan.....	66
4.5 Jenis UMKM Desa Gintangan	66
4.6 Daftar UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan beserta jumlah tenaga kerja.....	70
4.7 Kebutuhan alat menganyam.....	71
4.8 Usulan masyarakat pada kegiatan Musrenbangdes Desa Gintangan tahun 2019	73
4.9 Delegasi Musrenbangdes Desa Gintangan dan Musrenbangcam kecamatan Blimbingsari.....	74
4.10 Daftar pelaksana dan pelaku pemberdayaan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan	76
4.11 Perkembangan jenis produk kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan	81
4.12 <i>Output</i> pelatihan peningkatan kelembagaan dan manajemen usaha akuntansi.....	82
4.13 Pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan.....	90

DAFTAR BAGAN

	Halaman
3.1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian	37
4.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi	56



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi.....	50
4.2 Tampilan Digital <i>Market Place</i> Banyuwangi-Mall	84
4.3 Banyuwangi Festival 2017-2019	85



DAFTAR LAMPIRAN

- a. Foto Produk Kerajinan Anyaman Bambu Desa Gintangan.....
- b. Foto Kegiatan Pelatihan Pembuatan Anyaman Bambu
- c. Foto Foto Kegiatan Pelatihan Pemasaran *Online*
- d. Foto Kegiatan Banyuwangi Festival
- e. Foto Kegiatan Wawancara
- f. Pedoman Wawancara I.....
- g. Pedoman Wawancara II
- h. Pedoman Wawancara III
- i. Transkrip Wawancara I
- j. Transkrip Wawancara II.....
- k. Transkrip Wawancara III.....
- l. Surat Penelitian Lp2m Universitas Jember
- m. Surat Ijin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.....
- n. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.....
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013
Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kabupaten
Banyuwangi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi. Pengertian pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*”, yaitu upaya mengaktualisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Surjono dan Trilaksono, 2008:25). Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dengan ketrampilan yang mereka miliki sehingga tujuan pembangunan pemerintah berjalan dengan baik. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 1 ayat 12, pemberdayaan yaitu:

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan untuk menyiapkan pelaku usaha dalam menghadapi persaingan. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Pasal 1 ayat 26 peraturan yang sama menjelaskan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah “Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama”.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM Bab 1 Pasal 1, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

1. usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha yang memiliki jumlah kekayaan paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 30.000.000,00;

2. usaha kecil adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha yang memiliki jumlah kekayaan paling bersih Rp 50.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 samai paling banyak Rp 2.500.000.000,00; dan
3. usaha menengah adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha yang memiliki jumlah kekayaan paling bersih Rp 500.000.000,00 sampai Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

Setiap tahun jumlah UMKM di Kabupaten Banyuwangi terus bertambah dikarenakan adanya pertumbuhan wirausaha baru. Jumlah UMKM di Kabupaten Banyuwangi saat ini secara keseluruhan sebanyak 296.706 pelaku usaha. Berikut jumlah UMKM Kabupaten Banyuwangi berdasarkan jenis usaha.

Tabel 1.1 Jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Banyuwangi, tahun 2017

Jenis Usaha	Jumlah
Usaha Mikro	280.204
Usaha Kecil	15.269
Usaha Menengah	1.233
Total	296. 706

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, tahun 2018

Berdasarkan kriteria UMKM maupun jumlah UMKM di Kabupaten Banyuwangi, usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan tergolong usaha mikro dan usaha kecil. Pada lingkup desa yang sama, usaha ini terbagi menjadi jenis usaha yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah aset atau omzet dari masing-masing pemilik usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan. Berikut tabel hasil penjualan tahunan dan jumlah aset yang dimiliki tiap pemilik usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan.

Tabel 1.2 Jumlah kekayaan dan hasil penjualan tahunan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan

Nomor	Nama Usaha	Jumlah Kekayaan	Hasil Penjualan Tahunan	Jenis Usaha
1.	Widya Handycraft	Rp 500.000.000,00	Rp 480.000.000,00	Usaha kecil
2.	Cindy Ayu Handycraft	Rp 35.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Usaha mikro
3.	Karya Nyata Handycraft	Rp 400.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Usaha kecil
4.	Aulia Hnadcrafft	Rp 450.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Usaha kecil
5.	Wiwik Handycraft	Rp 25.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Usaha mikro

Sumber: hasil wawancara dengan pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan, 2019 (diolah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kerajinan anyaman bambu yang berada di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi merupakan sentra unggulan penghasil kerajinan anyaman bambu yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sentra kerajinan anyaman bambu tersebut dimulai sejak nenek moyang di Desa Gintangan menggunakan perkakas rumah tangga yang terbuat dari bambu. Perkembangan zaman membawa masyarakat desa untuk terus berinovasi sehingga menghasilkan jenis anyaman bambu yang beraneka ragam seperti saat ini. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Rusdianah Kepala Desa Gintangan yang mengatakan bahwa:

waktu itu memang tradisional sih kayak alat rumah tangga terbuat dari bambu, irik, welasah, tenong. Produk-produk itu dulu nenek moyang kita memproduksi, kemudian tampah untuk memisahkan beras. Kemudian lama kelamaan *dimodif-modif*. Kalau dulu seperti itu sekarang produk-produk kursi makan, kursi tamu, dipan, cermin semuanya produksi dari bambu (wawancara pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 08.54 WIB).

Pelaku UMKM terus berinovasi dalam mengembangkan desain produk sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Proses produksi kerajinan anyaman

bambu di Desa Gintangan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pembuatan lembaran anyaman dan pembuatan produk anyaman. Lembaran anyaman biasanya dikerjakan di rumah-rumah oleh ibu-ibu yang sudah lanjut usia sebagai pekerjaan sampingan. Lembaran anyaman yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada pengepul untuk dirangkai oleh bapak-bapak menjadi barang jadi. Produksi kerajinan anyaman bambu mampu dihasilkan sejumlah seratus buah perhari (wawancara dengan Bayu pemilik toko Widya handycraft pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 09.20 WIB). Jumlah pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan yaitu lima UMKM. Berikut daftar UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan.

Tabel 1.3 Daftar UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan

Nama UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
Widya Handycraft	35 orang
Cindy Ayu Handycraft	22 orang
Aulia Handycraft	21 orang
Karya Nyata Handycraft	21 orang
Wiwik Handycraft	12 orang

Sumber: hasil wawancara dengan pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan, 2019 (diolah)

Berdasarkan proses pengembangannya, para pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan masih mengalami sejumlah kendala. Kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan tersebut menghambat dalam mengembangkan bisnis kerajinan anyaman bambu. Beberapa kendala yang dihadapi UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan yaitu sebagai berikut.

1. Manajemen keuangan

Pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu dalam mengembangkan usahanya terkendala dalam manajemen keuangan. Besarnya modal yang mereka miliki tidak menjamin mereka dapat mengembangkan usaha tersebut dengan baik. Manajemen keuangan menjadi penghambat sehingga seringkali modal yang mereka miliki masih belum bisa mencukupi kebutuhan membeli bahan baku untuk produk kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan.

2. Tenaga kerja

Permasalahan yang kedua timbul dikarenakan kurangnya ketrampilan yang dimiliki oleh para tenaga kerja UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan. Ketrampilan yang minim dalam membuat kerajinan anyaman bambu serta kurang tertariknya tenaga kerja untuk berinovasi menghasilkan produk kerajinan menjadi penghambat UMKM dalam mengembangkan usaha tersebut. Hal ini dikarenakan tenaga kerja dari masing-masing UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan didominasi oleh kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki dasar pendidikan rendah sehingga terbatasnya kemampuan serta ketampilan mereka dalam berinovasi menghasilkan jenis produk baru (hasil wawancara dengan pelaku UMKM anyaman bambu Desa Gintangan, 2019).

Berdasarkan pada kondisi demikian, maka perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk turut serta mengatasi permasalahan yang muncul. Penyelesaian yang dapat dilaksanakan berupa kegiatan pemberdayaan kepada pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan berfokus pada kelembagaan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan dan juga pada tenaga kerja yang ada, hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam usaha kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan.

Kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi menjadikan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bayu pemilik toko Widya handicraft diketahui bahwa pemasaran hasil produk kerajinan anyaman bambu sudah mencapai ekspor sebagai bukti keberhasilan kegiatan pemberdayaan yang telah diberikan. Produk kerajinan anyaman bambu yang dipesan terdiri dari keranjang buah, kotak tissue, dan tempat kue. Pemesanan tingkat ekspor biasa dilakukan oleh orang Indonesia yang sudah menetap di luar negeri.

Pengenalan kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan juga dilakukan melalui festival bambu Gintangan. Melalui festival tersebut, kerajinan anyaman bambu banyak dikenal oleh masyarakat secara nasional hingga internasional.

Sebagai bukti, beberapa pengrajin anyaman bambu di Desa Gintangan telah memasarkan produknya hingga ke luar negeri seperti Belanda, Rusia, Jerman, India, Australia dan beberapa negara lain. Produk yang dipesan beraneka ragam mulai dari souvenir yang terbuat dari anyaman bambu hingga bambu lokal yang dibuat sebagai bahan dasar gazebo (Sumber: <http://BaliTribunnews.com> diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 06.00 WIB).

Berdasarkan pada kegiatan pemberdayaan yang sudah dilaksanakan, terdapat dua UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan daftar UMKM yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.4 Daftar UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan yang mendapat kegiatan pemberdayaan

Nama UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
Widya Handycraft	35 orang
Aulia Hndycraft	21 orang

Sumber: hasil wawancara dengan pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan, 2019 (diolah).

Berdasarkan jumlah lima UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan yang ada, hanya dua UMKM yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi. Terciptanya kondisi yang berbeda ini membuat iklim usaha yang tidak kondusif di antara pelaku UMKM di Desa Gintangan. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan untuk menciptakan usaha yang tangguh dan mandiri. Terdapat pelaku UMKM yang merasa terbantu dengan adanya kegiatan pemberdayaan sehingga mereka dapat terus mengembangkan usahanya, namun juga terdapat pelaku UMKM yang harus berusaha sendiri untuk dapat mengembangkan usahanya tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah maupun non pemerintah. UMKM kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan merupakan potensi daerah yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terutama Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pemberdayaan secara merata dengan tujuan mengembangkan usaha masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 16 ayat 1, “pemerintah daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis dengan menetapkan peraturan dan kebijakan untuk menjadikan usaha yang tangguh dan mandiri. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi, pada konsideran bagian menimbang huruf c disebutkan bahwa “Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan Usaha Mikro dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di Masyarakat;” dan huruf d disebutkkan bahwa “untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna”.

Menurut peraturan yang sama pada pasal 10 ayat 1, “Dalam hal pemberdayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas”. Dinas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada UMKM di Kabupaten Banyuwangi adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dijelaskan melalui peraturan yang sama pada pasal 1 ayat 4.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan kegiatan pemberdayaan kepada pelaku UMKM. Hal ini juga ditunjang pada dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam peningkatan dan pengembangan usaha mikro yaitu sebagai berikut:

- a. penguatan fasilitasi/ pendampingan dan konsultasi usaha;
- b. fasilitasi peningkatan kemitraan usaha mikro;
- c. fasilitasi promosi hasil produksi usaha mikro;
- d. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial sdm pelaku usaha mikro;
- e. penguatan kelembagaan dan organisasi kelompok usaha mikro;
- f. penguatan database usaha mikro; dan
- g. pengembangan sarana pemasaran hasil produksi usaha mikro.

Campur tangan pemerintah dalam pengembangan kegiatan masyarakat diklasifikasikan dalam lima kategori menurut Irving Swerdlow dalam Tjokroamidjojo (1995:19) yaitu:

- a. operasi langsung (*operation*): pemerintah menjalankan sepenuhnya kegiatan tertentu;
- b. pengendalian langsung (*direct control*): pemerintah berperan langsung dalam kegiatan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain);
- c. pengendalian tak langsung (*indirect control*): pemerintah hanya memfasilitasi dalam bentuk peraturan;
- d. pemengaruhan langsung (*direct influence*): pemerintah mempengaruhi dengan cara persuasi dan nasehat kepada masyarakat dalam kegiatan pengembangan; dan
- e. pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*): pemerintah hanya berperan dalam membagi informasi maupun kebijakan.

Menurut kelima kategori tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi tergolong dalam kategori operasi (*operation*) yaitu pemerintah menjalankan seluruh kegiatan tertentu yang ditujukan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi ditegaskan pada Bab III pasal 4 peraturan yang sama yaitu sebagai berikut.

- a. Pengembangan usaha

Upaya pemberdayaan dalam bentuk pengembangan usaha terbagi menjadi dua bentuk seperti yang dijelaskan pada Bab IV pasal 5 bahwa pengembangan usaha dilakukan meliputi pemberian fasilitas kepada UMKM serta pelaksanaan

pengembangan UMKM. Fasilitasi pengembangan dapat dilakukan dalam bidang pengolahan dan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan desain.

b. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan pelaku UMKM dengan bidang usaha yang sama maupun berbeda dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling mempercayai, dan saling membutuhkan.

c. Perizinan

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha kepada UMKM. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan melindungi hasil produk tiap UMKM.

d. Koordinasi dan Pengendalian

Koordinasi dan Pengendalian dilakukan apabila kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh pihak non pemerintah. Pemerintah daerah dapat memberikan motivasi kepada lembaga yang memberikan pemberdayaan kepada UMKM. Koordinasi dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan-perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Pemerintah memiliki wewenang dan kewajiban untuk memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Upaya ini dilakukan sebagai bahan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan usaha serta menjadikan usaha yang tangguh dan mandiri. Keberadaan peraturan pemerintah terutama peraturan daerah ini muncul sebagai wujud kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya berdasarkan potensi dan kebutuhan dari masyarakat atau yang disebut dengan asas otonomi daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki fungsi otonomi. Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan potensi maupun sumberdaya yang dimiliki setiap daerah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut melewati serangkaian kegiatan secara terencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya dengan adanya otonomi daerah dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah (Widjaja, 2014:7). Undang-Undang tentang Otonomi Daerah kemudian mengalami peyempurnaan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 17 ayat 1 menjelaskan sebagai berikut, bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa UMKM perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Menurut asas otonomi, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam memajukan daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini cenderung berfokus pada usaha besar, maka kecenderungan tersebut harus diubah (Dinari, 2017:3). UMKM terutama pada daerah perdesaan merupakan potensi daerah yang harus didorong dan diperkuat usahanya sehingga menjadi usaha unggulan daerah. Keberadaan UMKM kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan berpengaruh pada perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. UMKM kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan banyak menyerap tenaga kerja dari warga sekitar.

Kesenjangan apa yang seharusnya terjadi menurut peraturan daerah dan senyatanya yang terjadi pada UMKM kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan menjadi masalah yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dengan itu, maka judul penelitian ini adalah **“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut (Sugiyono, 2008: 32) “Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan atas apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi”. Masalah dalam penelitian untuk menentukan peneliti tentang objek yang akan ditelitinya. Masalah penelitian merupakan objek yang penting untuk diteliti atau menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini yaitu **“bagaimana bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mencari jawaban/solusi dari suatu masalah (Hikmat, 2011:19). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk terdeskripsikannya bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) anyaman bambu di Desa Gintangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan selalu memiliki harapan untuk dapat menimbulkan manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Manfaat bagi peneliti

Manfaat yang didapat peneliti dari penelitian ini yaitu dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah diajarkan di bangku perkuliahan ke lingkungan sekitar.

b. Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah

Manfaat penelitian untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu sebagai bahan masukan pemerintah terkait dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kerajinan anyaman bambu, pada khususnya 2 UMKM pada umumnya.

c. Manfaat akademis

Manfaat akademis penelitian ini yaitu sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan pemilihan topik yang sama serta memberikan kontribusi kepada akademis bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya pada konsentrasi Pemerintahan Daerah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:39) “tinjauan pustaka meliputi kajian teori dan kajian hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) yang relevan dengan masalah yang dibahas”. Penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencari kebenaran pada suatu peristiwa, dalam hal ini memerlukan konsep untuk melakukan proses penelitian. Konsep digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedang dikaji, sehingga memudahkan peneliti untuk meneliti suatu peristiwa. Menurut Bungin (2013:73) konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Sebagai sesuatu yang general, konsep bermula dari teori-teori yang terbentuk dan konsep memiliki generalisasi yang berbeda-beda (Bungin, 2013:73).

Berdasarkan definisi konsep tersebut, konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

1. Administrasi Publik.
2. Otonomi dan Desentralisasi.
3. Pemberdayaan.
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
5. Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
6. Kerajinan tangan.

2.1 Administrasi Publik

2.1.1 Definisi Administrasi

Administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrare* yang memiliki arti melayani, membantu, melaksanakan, mendayagunakan, menerapkan...dalam bahasa perancis administrasi disebut dengan kata *administer*, dari definisi tersebutlah kemudian muncul kata *administration* (Syafie, 2003:6). Menurut

buku petunjuk administrasi terbitan Universitas Gajah Mada (Syafiie, 2003:6) administrasi disebutkan sebagai berikut:

1. aktivitas yang bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan;
2. proses yang direncanakan sedemikian rupa dalam usaha bersama, baik usaha pemerintah maupun swasta, usaha sipil maupun usaha militer, usaha skala besar maupun usaha kecil-kecilan;
3. pengorganisasian dan bimbingan orang-orang, agar dapat melaksanakan suatu kajian khusus; dan
4. proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia, untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwa administrasi merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara terencana dan dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Administrasi juga dapat disebut sebagai seni, karena dalam administrasi dikenal berbagai cipta, rasa dan karsa seorang administrator (Syafiie, 2003:7).

2.1.2 Definisi Administrasi Publik

Istilah administrasi publik berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi yaitu proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan publik dapat diartikan umum, masyarakat, maupun negara. Istilah publik menurut Syafiie dkk. (1999:18) yaitu “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Berdasarkan definisi tersebut administrasi publik diartikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam mengatasi masalah-masalah umum.

Definisi administrasi publik juga disampaikan oleh Prajudi Atmosudirdjo dalam Syafiie dkk. (1999:26) bahwa “administrasi publik adalah administrasi dari pada negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan bersifat kenegaraan”. Proses pencapaian tujuan publik tersebut dilakukan oleh aktor-aktor yang berkenaan dalam proses pelayanan publik tersebut. Nigro dan Nigro dalam Syafiie (2003:32) menjelaskan administrasi publik adalah:

1. (administrasi publik) adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. (administrasi publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka;
3. (administrasi publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintahan dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik;
4. (administrasi publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat; dan
5. (administrasi publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Berdasarkan pada beberapa definisi diatas, disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama dua orang ataupun lebih untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Kerjasama-kerjasama untuk mencapai tujuan publik dipelajari oleh ilmu administrasi negara. Bentuk pelaksanaan dalam kerjasama publik tersebut bermacam-macam, kerjasama bisa dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan kerjasama untuk tujuan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah diwadahi oleh otonomi daerah dan desentralisasi.

2.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berupa kepulauan yang bersatu dalam nusantara. Berdasarkan hal tersebut UUD 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. UUD 1945 pasal 18 menjelaskan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Berdasarkan luas wilayah Negara Indonesia, maka pembagian urusan pemerintahannya dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, kabupaten maupun kota untuk memudahkan sistem administrasi dalam sebuah negara.

Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menterinya. Urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah pusat terdiri dari pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah absolut terdiri dari 6 hal yaitu: 1) politik luar negeri; 2) fiskal dan moneter; 3) agama; 4) peradilan negara (yustisi); 5) keamanan negara; dan 6) pertahanan militer.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi anatar pemerintah pusat dan daerah provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kedua urusan pemerintahan terakhir yaitu urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah atau diberikan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah disebut desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki fungsi otonomi. Otonomi adalah hak, kewajiban dan wewenang setiap daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan pada kebutuhan, potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah otonom. Menurut Adisasmita (2011:3) menjelaskan bahwa “otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah otonom (dalam hal ini adalah kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah setempat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Munculnya pembagian urusan kepada pemerintahan daerah yakni agar proses pembangunan yang dilaksanakan berjalan efektif dan tercapainya tujuan dari yang telah ditentukan sebelumnya. Keberadaan pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya, sehingga program yang dibuat oleh pemerintah dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Widjaja (2014:7) yang mengatakan bahwa “melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 2 yaitu sebagai berikut.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurus daerahnya sendiri berdasarkan kebutuhan, potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Pelaksanaan proses pembangunan yang dilakukan

di daerah juga harus mengacu kepada pedoman dari pemerintahan yang berada di atasnya, yaitu pemerintah pusat yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Saragih (2003:41) menjelaskan bahwa “otonomi daerah di sini tidak merupakan pendelegasian wewenang, melainkan pemberian atau pelimpahan wewenang. Dengan demikian penerima wewenang mempunyai otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankan sesuai dengan caranya masing-masing”.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini yaitu antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pembangunan (Widjaja, 2014:76). Maka adanya pemerintahan daerah yaitu untuk memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri menurut prakarsa setiap daerah melaksanakan proses pembangunan, sehingga proses pembangunan terlaksana merata hingga tingkatan terbawah dengan adanya pemerintahan daerah.

Keberadaan otonomi daerah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengurus segala kepentingan masyarakatnya (skala lokalitas). Urusan-urusan pemerintah pusat kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali urusan yang masuk dalam bagian urusan pemerintah absolut. Urusan pemerintah lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah atas penyelenggaraan desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kewajiban dan wewenang untuk dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik (Widjaja, 2004: 6). Pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian tugas dari pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

2.3 Pemberdayaan

2.3.1 Definisi Pemberdayaan

Sedarmayanti (2012:296) menjelaskan bahwa, “Pemberdayaan merupakan proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan dan peningkatan terus-menerus”. Konsep pemberdayaan merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sasaran pemberdayaan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik (Widjaja, 2004:6). Orientasi pemberdayaan mengacu pada *target group*, bahwa kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan kepada kelompok sasaran yang memiliki kemampuan lemah ataupun yang tidak memiliki kemampuan (Sulistiyani, 2004: 81). Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan dapat dilakukan kepada organisasi atau kelembagaan dan juga masyarakat atau tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan atau memiliki kemampuan namun lemah.

Pengertian pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*”, yaitu upaya mengaktualisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Surjono dan Trilaksono, 2008:25). Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dengan ketrampilan yang mereka miliki sehingga tujuan pembangunan pemerintah berjalan dengan baik. Pemberdayaan memerlukan waktu yang lama, karena dalam proses pemberdayaan akan terdapat perubahan-perubahan yang terjadi seperti: apa, mengapa, di mana, bilamana, siapa, bagaimana mengubah, apa hambatannya dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut (Sedarmayanti, 2012:296).

2.3.2 Sasaran Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap mandiri dalam masyarakat. Masyarakat dibina, dibimbing dan diarahkan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Schumacher dalam Sulistiyani (2004:90) memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural. Pada awalnya upaya memberdayakan masyarakat dihadapkan pada kondisi masyarakat atau bagian dari masyarakat yang masih dalam kondisi yang lemah. Hal ini dapat terjadi pada masyarakat secara keseluruhan di wilayah tertentu sama sekali tidak berdaya. Dengan demikian orientasi pemberdayaan mengacu pada *target group* masyarakat. Sisi lain, sasaran yang perlu diberdayakan hanyalah bagian dari masyarakat saja, yaitu khususnya pihak yang belum memiliki daya (Sulistiyani, 2004:81).

2.3.3 Model-Model Pemberdayaan

Berkaitan dengan konsep pemberdayaan, terdapat tiga hal yang merupakan inti dari kegiatan pemberdayaan, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dan terciptanya kemandirian masyarakat. Oleh karenanya pemberdayaan tidak hanya memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, namun pemberdayaan juga berarti mengembangkan masyarakat yang memiliki kemampuan yang lemah (tidak berdaya) untuk dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian (Winarni dalam Sulistiyani, 2004:79). Terdapat empat strategi yang dapat ditawarkan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, yaitu (1) memberdayakan masyarakat dengan tahap pertama berupa “menyosialisasikan” peran masyarakat sebagai subjek dalam kegiatan pemberdayaan, (2) mendayagunakan “mekanisme” penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratis, efektif dan efisien, (3) mobilisasi “sumber daya” manusia seperti tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai profesionalismenya, dan (4) memaksimalkan peran

pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan (Prasojo dalam Agus dan Trilaksono, 2008:27).

Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah harus dilakukan dengan perlahan sehingga tidak membuat kaget masyarakat sebagai sasaran dalam kegiatan pemberdayaan. penjelasan ini seperti yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Cina, Y.C. Yen (1920) dalam Agus dan Trilaksono (2008) setiap penggerak pembangunan yang melaksanakan pemberdayaan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. *go to people*, mendatangi masyarakat yang hendak diberdayakan;
2. *live among the people*, hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhannya;
3. *learn from the people*, belajarlah dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada di benak mereka, potensi apa yang mereka miliki;
4. *plan with the people*, ajak dan ikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan;
5. *work with the people*, ajak dan libatkan mereka dalam proses pelaksanaan rencana;
6. *start with what the people know*, mulailah dari apa yang masyarakat ketahui dan pahami;
7. *build on what the people have*, bangunlah sesuatu dari modal yang dimiliki masyarakat;
8. *teach by showing, learn by doing*, ajarilah masyarakat dengan contoh konkretnya;
9. *not a showcase, but a pattern*, mereka jangan dipameri dengan sesuatu yang menilaukan, tetapi berikanlah kepada mereka suatu pola;
10. *not odds and ends, but a system*, jangan tunjukan kepada mereka sesuatu yang aneh dan akhir dari segalanya tetapi berikanlah kepada mereka suatu sistem yang baik dan benar;
11. *not piecemeal, but integrated approach*, jangan menggunakan pendekatan yang sepotong-potong, tetapi pendekatan yang menyeluruh dan terpadu;

12. *not to conform but to transform*, bukan penyesuaian cara/ model, tetapi transformasi model; dan
13. *not relief but release*, jangan berikan penyesalan akhir kepada mereka tetapi beri kebebasan kepada mereka sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.

2.3.4 Tahap-Tahap Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan yaitu untuk menjadikan masyarakat yang tangguh dan mandiri. Hal ini dicapai dengan cara mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Kegiatan pemberdayaan tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, namun kegiatan pemberdayaan juga diberikan kepada masyarakat yang lemah terhadap kemampuan yang mereka miliki, maka mereka perlu diberdayakan agar terbentuk kemandirian. Kemandirian masyarakat adalah kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Sulistiyani, 2004:80).

Pencapaian kemandirian masyarakat membutuhkan proses. Melalui proses belajar yang dilakukan maka secara bertahap kemampuan masyarakat akan semakin bertambah dan terasah, maka kemampuan memadai yang terakumulasi tersebut mengantarkan mereka pada kemandirian. Menurut Sulistiyani (2004:83) tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan yaitu sebagai berikut.

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pihak pemberdaya dari pemerintah maupun non pemerintah menciptakan prakondisi, agar pemberdayaan berjalan efektif. Tahap penyadaran dilakukan

agar masyarakat menyadari akan pentingnya pengembangan diri kearah yang lebih baik melalui kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan. Pada tahap ini pula membawa kesadaran masyarakat untuk bangkit dan meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan;

b. tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Pada tahap ini masyarakat menjalani proses belajar yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan. Keadilan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sebagai objek dan belum mampu berperan sebagai subjek pembangunan; dan

c. tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Kemandirian masyarakat ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila tahap ketiga telah dilaksanakan, maka masyarakat sudah dapat dikatakan mandiri dalam pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat seperti ini, masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan sedangkan pemerintah sebagai fasilitator.

Pemberdayaan yang telah membentuk masyarakat menjadi mandiri tidak begitu saja ditinggalkan. Menurut Sumodiningrat dalam Sulistiyani (2004:84) masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dalam kemandirian yang sudah terbangun dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Kemandirian mereka haruslah dilindungi agar tetap terpelihara dengan baik yang kemudian dapat membentuk sikap kedewasaan masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan Sulistiyani, Sumodiningrat (1997:165) menjelaskan tiga upaya yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat, yaitu sebagai berikut.

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Mengenalkan/ menyadarkan potensi yang dimiliki setiap manusia dan masyarakat.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Penyediaan berbagai *input*, serta pembukaan akses kepada masyarakat untuk menjadi berdaya.
3. Memberdayakan berarti melindungi, artinya masyarakat dibimbing dengan potensi yang dimiliki agar terbentuk kemandirian dan meningkatkan kemampuan.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pihak pemberdaya, peneliti menggunakan teori tahap-tahap pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sulistiyani yaitu tahap penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah perkumpulan usaha milik perseorangan atau badan usaha yang berada di wilayah yang sama dan memiliki bahan, proses pengerjaan barang, serta hasil produk yang sama. Kumpulan usaha tersebut memiliki peluang yang besar dalam menghadapi persaingan antar pelaku usaha sehingga mereka harus terus berinovasi untuk dapat mengembangkan usahanya. Pemerintah memberikan perhatian lebih pada UMKM karena dari situlah tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia (Wijaya, 2018:8). Perhatian pemerintah pada UMKM juga didasari pada keberhasilan UMKM yang telah berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Kontribusi yang diberikan berupa terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatnya perekonomian daerah, dan pengentasan kemiskinan.

Kriteria maupun pelaksanaan UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Definisi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bermacam-macam. Berikut beberapa definisi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia yang telah dirangkum dari beberapa sumber yang dikutip dari Wijaya (2018:8) yaitu sebagai berikut.

1. Badan Pusat Statistik Nasional mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut jumlah tenaga kerja. Usaha Mikro memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang, dan usaha menengah memiliki jumlah tenaga sebanyak 20- 99 orang. Definisi ini hanya melihat pada jumlah tenaga kerja pada perusahaan, tanpa memperhatikan perusahaan tersebut menggunakan mesin ataupun tidak, serta besaran modal yang digunakan.
2. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menengkop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Usaha Menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan UMKM sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro adalah usaha milik perseorangan maupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam undang-undang;
 - b. Usaha Kecil adalah usaha milik perseorangan maupun badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan dikuasai, dimiliki serta cabang dari perusahaan menengah maupun usaha besar dan sesuai dengan kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang; dan

- c. Usaha Menengah adalah usaha milik pribadi maupun perseorangan yang berdiri sendiri. Golongan usaha ini bukan merupakan anak dari usaha kecil dan usaha besar yang dimiliki maupun dikuasai secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria usaha menengah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan pada aspek komoditas yang dihasilkan, Wijaya (2018:13) mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

1. kualitasnya belum standar
sebagian besar UMKM belum mempunyai kemampuan teknologi yang memadai dan produk yang dihasilkannya biasanya masih berbentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam;
2. desain produknya terbatas
hal ini dipicu dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk karena mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan sehingga belum banyak UMKM yang berani mencoba berkreasi desain baru;
3. jenis produknya terbatas
biasanya UMKM hanya bisa memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit memenuhinya. Hal semacam ini terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan dari pelaku UMKM, sehingga mereka cenderung kurang berinovasi untuk dapat mengembangkan jenis produk yang mereka pasarkan; dan
4. kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna
minimnya pengetahuan dari pelaku UMKM, menjadikan produk yang mereka hasilkan seringkali tidak teratur dan cenderung apa adanya.

Berdasarkan pada kriteria UMKM tersebut, hal ini juga tergolong pada kelemahan yang banyak dialami oleh pelaku UMKM. Potensi yang mereka miliki perlu dikembangkan untuk dapat menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan daya saing antar pelaku UMKM. Kondisi yang demikian, perlunya campur tangan dari pihak luar untuk membantu meningkatkan kemampuan dan

kemandirian pelaku UMKM. Kegiatan yang dimaksud untuk mengubah kondisi UMKM tersebut berupa kegiatan pemberdayaan UMKM.

2.5 Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu proses dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kegiatan pemberdayaan yang diberikan pemerintah maupun non pemerintah kepada masyarakat memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dengan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan dengan baik. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tersebut masuk dalam agenda pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Secara sederhana, pembangunan dimaknai sebagai suatu proses kearah yang lebih baik (Sumantri,2016:20). Kegiatan pembangunan tersebut dilakukan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta menuju modernitas. Menurut Alexander dalam Sumantri (2016:18) “pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya”.

Pembangunan yang dilakukan secara terencana dan sadar tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan masyarakat (*capacity building*). Pengertian pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*” yang berarti upaya untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Surjono dan Trilaksono, 2008:25). Pemberdayaan mengacu pada kekuatan tingkat individu untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya melalui program maupun kegiatan yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah. Menurut konsep pemberdayaan, masyarakat berperan sebagai subjek dalam kegiatan tersebut, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini karena dalam kegiatan pemberdayaan menekankan pada kemandirian masyarakat. Menurut Surjono dan Trilaksono (2008:25) “konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan”.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kondisi yang diupayakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama-sama untuk mengubah UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi persaingan. Upaya tersebut dapat berupa pembinaan dan pengembangan usaha kepada UMKM di setiap daerah. Upaya pemberdayaan perlu dilakukan sebagai wujud perhatian pemerintah kepada pelaku usaha yang memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional maupun daerah, terutama pada perluasan kesempatan kerja bagi warga sekitar, pengentasan kemiskinan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan penyerapan tenaga kerja bagi warga sekitar lingkungan UMKM.

Widjanarto (2007:262) menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha yaitu sebagai berikut: a) posisi perusahaan; b) kemungkinan memperluas bidang usaha; c) kemungkinan diversifikasi produk; d) kondisi karyawan; e) kebijakan pemerintah; f) prospek usaha; g) investasi yang diperlukan; h) tersedianya tenaga ahli; dan i) bentuk perusahaan.

Sebagai tindak lanjut pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah dikembangkan konsep berupa kemitraan antara pelaku usaha dengan pihak perbankan yang dinamakan Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBKSM). Menurut Widjanarto (2007:262) “sebagai langkah positif, pemerintah melalui paket 12 Juni 2007 khususnya Inpres Nomor 6 tahun 2007, berupaya memberdayakan UMKM agar lebih produktif dan berkembang sesuai dengan tuntutan reformasi disegala bidang”.

Pemberdayaan UMKM dilakukan untuk mengembangkan usaha masyarakat sehingga dapat bersaing dalam dunia usaha yang lebih luas. Tujuan pemberdayaan UMKM juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 pada pasal 5 yang menjelaskan sebagai berikut.

“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan:

- a. mewujudkan sektor perekonomian di Jawa Timur yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”.

Berdasarkan pada tujuan pemberdayaan yang telah dijelaskan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkan usaha masyarakat agar menjadi usaha yang kuat dan dapat bersaing dengan usaha lainnya. Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan ditegaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 11 tahun 2013 Bab III pasal 4 yaitu sebagai berikut.

a. Pengembangan usaha

Upaya pemberdayaan dalam bentuk pengembangan usaha terbagi menjadi dua bentuk seperti yang dijelaskan pada Bab IV pasal 5 bahwa pengembangan

usaha dilakukan meliputi pemberian fasilitas kepada UMKM serta pelaksanaan pengembangan UMKM. Fasilitas pengembangan dapat dilakukan dalam bidang pengolahan dan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan desain.

b. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan pelaku UMKM dengan bidang usaha yang sama maupun berbeda dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling mempercayai, dan saling membutuhkan

c. Perizinan

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha kepada UMKM. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan melindungi hasil produk tiap UMKM.

d. Koordinasi dan Pengendalian

Koordinasi dan Pengendalian dilakukan apabila kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh pihak non pemerintah. Pemerintah daerah dapat memberikan motivasi kepada lembaga yang memberikan pemberdayaan kepada UMKM. Koordinasi dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

Bentuk- bentuk pemberdayaan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 11 tahun 2013 yaitu: 1) pengembangan usaha; 2) kemitraan; 3) perizinan; dan 4) koordinasi dan pengendalian.

2.6 Kerajinan Tangan

Kerajinan adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh semangat ketekunan, kecekan, kegigihan, berdedikasi tinggi dan berdaya maju yang luas dalam melakukan suatu karya. Kerajinan tangan adalah menciptakan produk atau barang yang dikerjakan dengan tangan sehingga memiliki fungsi pakai dan nilai jual. Kerajinan tangan juga merupakan kegiatan

seni yang menitik-beratkan kepada ketrampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai tapi juga bernilai estetis (sumber: <https://www.materipelajaran.web.id/2015/01/pengertian-kerajinan-tangan.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 08.26 WIB). Salah satu hasil dari kerajinan tangan yaitu anyaman. Kerajinan anyaman yaitu hasil produk atau barang yang dihasilkan dari bahan tertentu yang dibentuk menjadi barang jadi melalui proses anyam. Menganyam merupakan proses mengatur bilah-bilah atau lembaran secara tindih-menindih dan silang menyilang. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan anyaman beraneka ragam tergantung hasil produk yang diinginkan. Bahan-bahan tersebut bisa berupa bambu, rotan, plastik, kertas, janur, atau kulit binatang.

Kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari merupakan sentra unggulan penghasil kerajinan anyaman bambu yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kerajinan anyaman bambu tersebut dimulai sejak nenek moyang Desa Gintangan menggunakan perkakas rumah tangga terbuat dari bambu. Perkembangan zaman menjadikan masyarakat desa berinovasi untuk membuat jenis anyaman bambu yang beraneka ragam dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini.

UMKM kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan banyak menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. Keberadaan UMKM kerajinan anyaman ini memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan di Desa Gintangan. Warga Desa Gintangan menjadikan kegiatan mengayam sebagai pekerjaan sampingan mereka diantara pekerjaan utama yang didominasi sebagai petani. Pengayam kerajinan bambu tersebut berasal dari kalangan lanjut usia yang terdiri dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Proses pembuatan kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan terdiri dari dua tahap, tahap pertama yaitu pembuatan lembaran anyaman bambu dan tahap kedua merangkai lembaran anyaman menjadi barang jadi.

Pembuatan lembaran anyaman biasanya banyak dikerjakan oleh ibu-ibu dan dikerjakan di tiap rumah-rumah warga sebelum disetorkan kepada pengepul. Tahap pembuatan barang jadi biasa dikerjakan oleh bapak-bapak di rumah para pengepul kerajinan di Desa Gintangan. Pengepul kerajinan biasanya mempekerjakan karyawannya dengan sistem borongan perbulan sehingga gaji dibayarkan tiap satu bulan sekali (sumber: <https://m.timesbanyuwangi.com> diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 11.20 WIB).

Pemasaran kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan dilakukan dalam tiga metode. Metode pertama dilakukan dengan cara menjajakan langsung hasil produk kerajinan anyaman bambu di kios-kios yang berada di tiap rumah pengrajin, metode kedua biasa dilakukan dengan menjual hasil produk kerajinan ke toko-toko oleh-oleh seluruh Kabupaten Banyuwangi maupun kios-kios buah di Kabupaten Banyuwangi, dan metode ketiga dengan memanfaatkan penggunaan teknologi pada media sosial agar jangkauan pemasaran lebih luas tidak hanya pada lingkup Kabupaten Banyuwangi. Produk-produk yang dipasarkan beraneka ragam mulai dari tempat kue, tempat buah, tempat tisu, tempat lampu, hiasan dinding, meja, kursi dan beberapa kerajinan lain yang berbahan dasar bambu.

Keberhasilan kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan ini terbukti pada sistem pemasarannya yang sudah mencapai ekspor. Terdapat salah satu pelaku UMKM kerajinan bambu Desa Gintangan yang sudah memasarkan hasil produknya hingga luar negeri. Pemesanan biasanya dilakukan oleh warga Indonesia yang telah menetap di luar negeri. Produk kerajinan yang dipesan biasanya yaitu souvenir yang terdiri dari tempat kue, kotak tisu, tempat buah. (wawancara kepada Bayu pemilik toko Widya Handycraft pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 09.30 WIB). Keberhasilan UMKM kerajinan anyaman bambu di desa Gintangan juga merupakan keberhasilan campur tangan pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Sepmigia Putri D.	Yogi Haqiqi Fanani
Perguruan Tinggi	Universitas Jember	Universitas Jember
Tahun Penelitian	2017	2018
	Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Jember Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Sumberjambe	Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Persamaan	Pemberdayaan UMKM	Menggunakan teori pemberdayaan
Perbedaan	Perbedaan terletak pada fokus dan lokus yang akan diteliti. pada penelitian ini fokusnya pada peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember	Menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat dan lokusnya berada di Badan Usaha Milik Desa

dan lokusnya berada di UMKM Batik Sumberjambe Kabupaten Jember.

Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Industri Batik Sumberjambe yaitu peran fasilitator, regulator, dan katalisator. Peran fasilitator diberikan dengan memberikan kegiatan pelatihan, pendidikan, manajemen pemasaran dan produksi. Peran regulator diberikan dengan fasilitasi kemudahan pengurusan izin usaha baik IUI maupun TDI. Peran katalisator diberikan dengan melakukan berbagai kegiatan promosi produk dengan mengikuti pameran, pelibatan pelaku usaha dalam pameran sudah sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

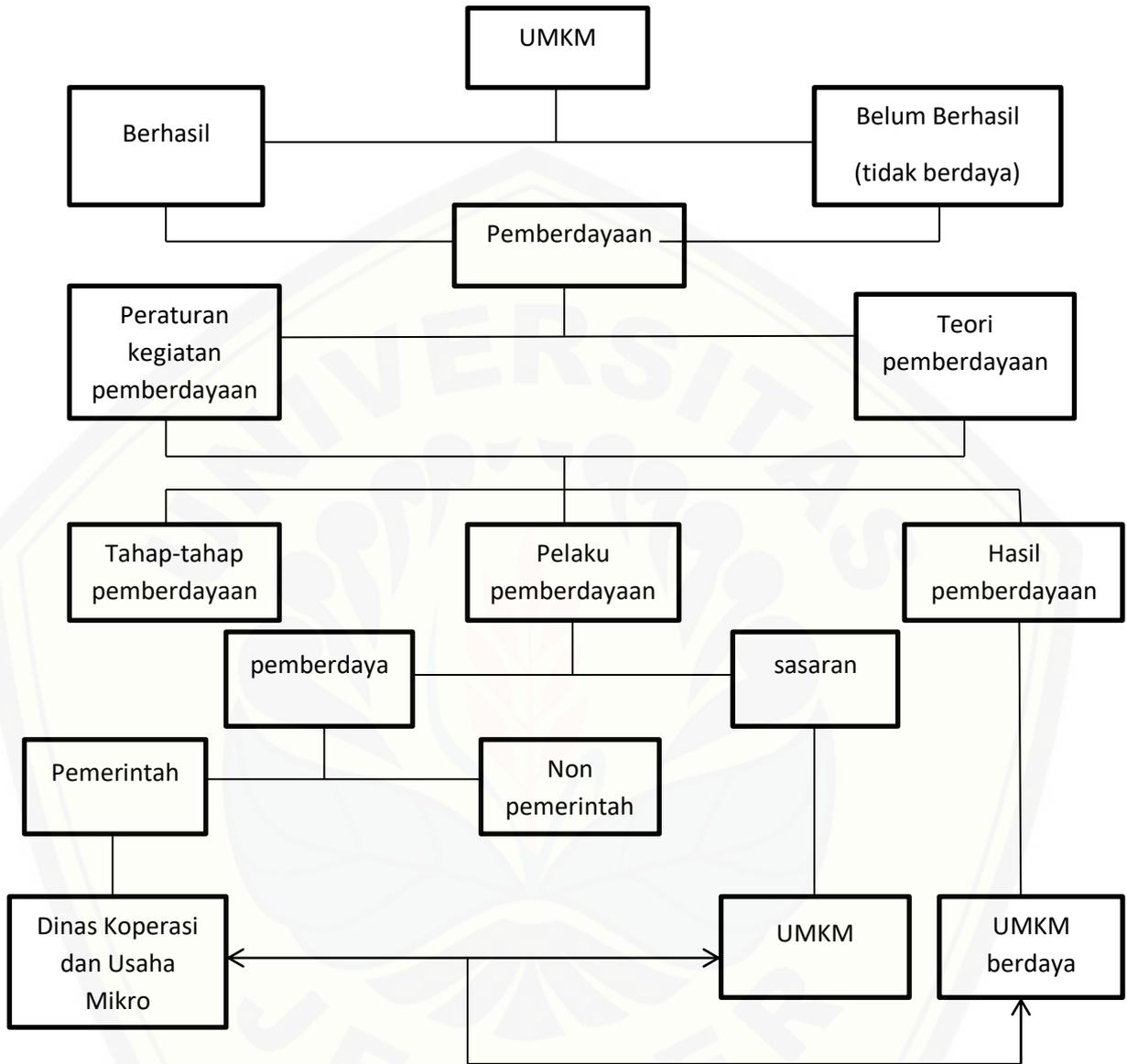
Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDES Desa Kemiren sesuai dengan tahapan dan prinsip pemberdayaan. prinsip mengerjakan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam usaha yang dikelola, prinsip akibat dengan melibatkan masyarakat dalam usaha BUMDES dan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa memanfaatkan potensi yang dimiliki sangat diperlukan, dan prinsip asosiasi yaitu dengan mengaitkan kegiatan pemberdayaan dengan kegiatan lainnya.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Khoirun Nisa	Dewi Kusuma Rahman
Perguruan Tinggi	Universitas Jember	Universitas Jember
Tahun Penelitian	2017	2015
Judul Penelitian	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberagung Dalam Memanfaatkan Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Pulomerah Kabupaten Banyuwangi	Pengaruh Kreativitas dan Perilaku Inovatif Terhadap Keberhasilan Usaha Industri Kecil Melalui Motivasi Usaha Sebagai Variabel Mediasi (Studi kasus pada pengusaha UKM kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kuantitatif Deskriptif
Persamaan	Menggunakan teori pemberdayaan	Menggunakan lokus yang sama yaitu pada usaha kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi

Perbedaan	Fokus pada pemberdayaan masyarakat dan lokus pada pemanfaatan kawasan destinasi pariwisata Pulomerah Kabupaten Banyuwangi	Fokus yang digunakan yaitu pada pengaruh kreativitas dan perilaku inovatif melalui motivasi usaha dan pendekatan yang digunakan
Hasil Penelitian	Pemberdayaan masyarakat pada kawasan destinasi wisata Pulomerah Kabupaten Banyuwangi dimulai dari tahap peningkatan kesadaran dan pembentukan perilaku di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan perlu ditingkatkan pada tahap transformasi kemampuan berupa ketrampilan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.	Hasil menunjukkan bahwa Kreativitas, perilaku inovatif, motivasi usaha berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha industri kecil kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi.

2.8 Kerangka Berpikir Penelitian



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Peneliti (2019)

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud yaitu cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian akan sangat membantu peneliti di bidang sosial untuk menemukan informasi, menjelaskan keadaan, dan membantu menciptakan ide-ide yang baru. Sejalan dengan pendapat Sugiyono, buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:50) mendefinisikan metode penelitian sebagai bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Memilih metode yang tepat untuk suatu penelitian akan menjadikan hasil dan rekomendasi penelitian lebih akurat dan tepat guna. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Situasi sosial.
4. Desain penelitian.
5. Teknik dan alat perolehan data.
6. Teknik menguji keabsahan data.
7. Teknik penyajian data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2004:3) menjelaskan “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang

tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi yang timbul di masyarakat sebagai objek penelitian. Ulber Silalahi (2009:25) mendefinisikan penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan kaidah hubungan antar-peristiwa, baik yang menjelaskan asosiasi, membuat prediksi-estimasi-proyeksi tentang gejala yang muncul, maupun melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa.

Berdasarkan pada uraian definisi tersebut, penelitian kualitatif deskriptif menurut peneliti yaitu mengkaji fenomena secara mendalam dengan upaya memberi gambaran dan uraian secara jelas terkait dengan objek penelitian. Maka dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang proses pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan instrumen penting dalam penelitian. Pemilihan dan penentuan waktu dan tempat penelitian akan menunjang hasil penelitian. Perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan berpengaruh pada hasil penelitian yang didapatkan walaupun dalam penelitian tersebut berada pada fokus yang sama. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:52), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan

kanan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penentuan waktu dan tempat penelitian didasarkan pada pertimbangan yang logis yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Pada penelitian ini, tempat penelitian yang dipilih yaitu di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Lokasi tersebut dipilih peneliti dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

1. Desa Gintangan Kecamatan Bimbingsari Kabupaten Banyuwangi merupakan sentra penghasil kerajinan anyaman bambu di Kabupaten Banyuwangi.
2. Pelaku UMKM di Desa Gintangan Kecamatan Bimbingsari Kabupaten Banyuwangi, mendapat perhatian dari pemerintah daerah berupa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.
3. Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan tidak merata, bertolak belakang pada kewajiban dan wewenang dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi kewenangan daerah.

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 15 April – 20 Juni 2019. Rentang waktu tersebut diharapkan peneliti dapat menemukan dan menggali informasi terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Situasi Sosial

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:52) situasi sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Informan kunci atau subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi, menguasai, memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, elemen situasi sosial pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Tempat (*place*)

Penelitian ini dilakukan di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

2. Pelaku (*actors*)

Pelaku yang dimaksud yakni informan yang dipilih untuk dapat memberi informasi terkait dengan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 1994:90). Pemanfaatan informan dalam penelitian dengan tujuan agar banyak informasi yang didapat dalam waktu yang relatif singkat. Pemanfaatan informan juga dilakukan agar informasi yang dibutuhkan dapat lebih jelas, karena informan yang ditentukan adalah orang yang memahami lebih dalam pada situasi terkait dengan penelitian.

Peneliti menggunakan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu:

- a. pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;
 - b. kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi;
 - c. kepala bagian usaha mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi; dan
 - d. kepala desa dan perangkat desa di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
- ## 3. Aktivitas (*activity*) yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut.
- a. Penentuan bentuk kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.
 - b. Penentuan sasaran kegiatan pemberdayaan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang telah di rencanakan kepada sasaran pemberdayaan yang telah ditentukan.

3.4 Desain Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52), dalam desain penelitian menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan

membuat kesimpulan atas temuannya. Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan memperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan selama penelitian (Silalahi, 2009:180). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena secara mendalam. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan situasi di lapangan secara rinci. Berdasarkan definisi tersebut, maka penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan peneliti yaitu penelitian untuk mengkaji fenomena secara mendalam dengan cara menggambarkan dan menjelaskan secara rinci.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk mengarahkan dan memusatkan permasalahan yang akan diteliti menjadi objek yang terpusat dan terarah sehingga kejelasan dan ketepatan objek yang diteliti dapat tercapai. Fokus penelitian juga membatasi objek yang diteliti sehingga tidak berfokus ganda dan keluar dari jalur permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Spradley dalam Bungin (2012:54) terdapat lima kriteria yang digunakan untuk menentukan informan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan yang bersangkutan.
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.
5. Subjek yang sebelumnya tergolong masih “asing” dengan penelitian, atau orang yang baru dikenal oleh peneliti.

Informan penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2012:85) *purposive* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut benar-benar mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan terkait masalah penelitian. Informan-informan tersebut diharapkan dapat berperan aktif dalam penelitian secara informal demi mendukung keberhasilan suatu penelitian.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, peneliti menggunakan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan dan tidak mendapatkan kegiatan pemberdayaan.
- b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.
- c. Kepala bagian usaha mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.
- d. Kepala desa dan perangkat desa di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

3.4.3 Data dan Sumber Data

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:51) data meliputi item data yang digunakan. Sumber data merupakan uraian tentang letak dan dari mana data diperoleh. Sumber data dapat berasal dari organisasi, lembaga, masyarakat, sistem, hewan, tumbuhan, bahan, alat, dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2017:104) sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan sumber yang

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dengan pengamatan (observasi), catatan lapangan, serta mewawancarai yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Pemerintah Desa Gintangan maupun Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi. Penelitian kualitatif pengukuran data dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Alat perolehan data yang digunakan peneliti yaitu berupa kamera untuk mendokumentasikan situasi di lapangan, alat perekam, dan buku catatan untuk mencatat situasi di lapangan. Berikut teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut.

3.5.1 Pengamatan (observasi)

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi digunakan peneliti untuk melihat secara langsung objek yang diteliti di lapangan dari berbagai segi kehidupan pada saat tertentu. Menurut Faisal (1990) dalam Sugiyono (2017:106) observasi diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu sebagai berikut: 1) observasi

partisipasi (*participant observation*); 2) observasi secara terang-terangan atau tersamar; dan 3) observasi tak terstruktur (*unstructured observation*).

Penelitian ini menggunakan observasi secara terang-terangan, yaitu pada awal observasi dilakukan, informan sudah mengetahui maksud kedatangan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian. Alat perolehan data yang digunakan pada observasi ini yaitu buku catatan dan kamera untuk mendokumentasikan situasi di lapangan.

3.5.2 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari suatu orang berdasarkan pandangannya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi dengan wawancara mendalam. Selama observasi dilakukan, peneliti juga melakukan wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian.

Esterberg dalam Sugiyono (2017:115) membagi teknik wawancara menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*)

Teknik wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Teknik wawancara ini, peneliti telah mengetahui permasalahan dalam objek penelitian, sehingga dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis atau yang disebut pedoman wawancara.

2. Wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*)

Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

3. Wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistemis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara jenis ini biasa dilakukan dalam penelitian pendahuluan tujuannya agar peneliti mendapatkan informasi terkait permasalahan dalam objek penelitian.

Berdasarkan penjelasan terkait jenis-jenis wawancara tersebut, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dalam penelitian ini. Alat bantu yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan wawancara dan hasil data yang diperoleh dari wawancara adalah buku catatan, alat perekam, dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini yaitu dokumen yang berada di kantor desa Gintangan atau kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan oleh dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.

3.5.4 Triangulasi

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Macam triangulasi ada dua

macam, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik yang berbeda-beda pada sumber yang sama. Teknik yang digunakan dapat berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti peneliti menggunakan teknik yang sama pada sumber data yang berbeda-beda. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu menggabungkan data atau informasi dari informan yang berbeda-beda.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong (2004:173) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2017:327) adalah sebagai berikut.

- a. Perpanjangan keikutsertaan, peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti dalam penelitian akan menjadikan peneliti turut menjadi bagian dalam objek penelitian. Hal ini dapat menjadi pendukung bagi keakuratan data.
- b. Ketekunan / keajegan pengamatan, keajegan pengamatan berarti secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses ilmiah yang konstan dan relatif. Keajegan digunakan untuk mencari ciri-ciri khusus yang sangat relevan dengan objek penelitian di lapangan.
- c. triangulasi, menurut Moleong (2015:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa teknik triangulasi yaitu menggabungkan data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang berbeda pula. Teknik yang digunakan yaitu

teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan metode.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2017:130). Analisis data juga merupakan upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami, memiliki makna dan bermanfaat menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2017:133) menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (verifikasi atau penarikan kesimpulan).

a. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Penelitian kualitatif pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Penelitian dilakukan sehari-hari hingga berbulan-bulan sampai data yang dibutuhkan tercukupi. Demikian peneliti akan mendapat data yang sangat banyak dan bervariasi.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses reduksi data berarti menyederhanakan data atau mengurangi data dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Menurut Prastowo (2012:242) proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Proses reduksi dapat dilakukan dengan memilih data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini,

peneliti menggunakan proses reduksi data dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Proses penyajian data dalam penelitian kualitatif menurut Prastowo (2012:244) terdiri dari sekumpulan informasi yang telah tersusun untuk dapat ditarik kesimpulan. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif. Fungsi dari mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

d. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Menurut Sugiyono (2011:253) kesimpulan merupakan temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang sebelumnya terlihat samar atau belum jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi kepada UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut.

1. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi kurang terlaksana dengan baik, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - a. tahap perencanaan yang dilaksanakan untuk menyusun usulan pelaku UMKM serta penentuan sasaran pemberdayaan kurang dilaksanakan secara maksimal, sehingga terdapat UMKM yang tidak mendapat bagian pemberdayaan;
 - b. tahap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yaitu pelaksanaan kegiatan yang telah diusulkan di tahap perencanaan. Pada tahap ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi menjalankan dengan baik sebagaimana pada kebutuhan yang sudah diusulkan pada tahap perencanaan; dan
 - c. tahap evaluasi atau pendampingan yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengevaluasi perkembangan usaha di UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan setelah kegiatan pemberdayaan terlaksana, evaluasi atau pendampingan biasa dilakukan melalui pantauan sosial media atau kunjungan rutin setiap bulan. Hal ini dilakukan dengan baik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.
2. Bentuk- bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan sebagai berikut:
 - a) pengembangan usaha
 - 1) pelatihan pembuatan anyaman bambu;

- 2) pelatihan kelembagaan dan manajemen usaha akuntansi dan pengembangan usaha;
 - 3) pelatihan pemasaran *online*;
 - 4) fasilitas pemasaran melalui *event* banyuwangi festival;
 - 5) fasilitas pelayanan klinik usaha mikro; dan
 - 6) rumah kreatif.
- b) kemitraan; dan
 - c) koodinasi atau pengendalian

keseluruhan bentuk pemberdayaan termasuk pelatihan yang diberikan tersebut, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan yaitu terkait dengan manajemen keuangan dan tenaga kerja.

3. Pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi kepada UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan, terdapat kendala yang dihadapi. Kendala tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Sumber daya manusia yang kurang antusias dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan;
 - b. Permodalan yang tidak difasilitasi oleh pihak pemberdaya untuk mengatasi permasalahan dari kelompok sasaran; dan
 - c. Perencanaan yang kurang baik dalam menentukan kelompok sasaran pemberdayaan.
4. Pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi kepada UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan, memiliki manfaat yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - a. Promosi produk. Kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan telah dikenal oleh masyarakat nasional hingga mancanegara;

- b. Peningkatan manajerial usaha. Kegiatan pemberdayaan yang sudah diberikan menimbulkan manfaat bagi manajerial usaha UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan. Sehingga tidak hanya produk yang menjadi fokus pemberdayaan melainkan SDM juga turut menjadi fokus.
- c. Rekomendasi pemberdayaan selanjutnya. Pemberdayaan yang sudah terlaksana dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak pemberdaya untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan di lokasi yang berbeda.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pemberdayaan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Sebelum kegiatan pemberdayaan tersebut dilaksanakan. Pihak pemberdaya memberikan sosialisasi kepada kelompok sasaran akan pentingnya kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap keinginan untuk mengembangkan kualitas diri dari para tenaga kerja.
2. Permasalahan terkait dengan modal dapat diatasi dengan cara pihak pemberdaya memberikan link kepada pihak perbankan bila terdapat UMKM yang terkendala dalam hal permodalan.
3. Pada tahap perencanaan untuk menentukan sasaran pemberdayaan dan kegiatan pemberdayaan dilakukan secara maksimal. Hal ini diharapkan agar kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan secara merata kepada seluruh UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan, sehingga perkembangan UMKM tersebut dapat dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, S., dan Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Bungin, B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hikmat, M.M. 2011. *Metodologi Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L.J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Sedarmayanti. 2012. *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silalahi, U. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemantri, S. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sumodiningrat, G. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Surjono, A., dan Trilaksono, N. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Syafiie, I.K., D. Tandjung. Dan S. Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafiie, I.K., 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Tjokroamidjojo, B. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Widjaja, H. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaya, D. 2018. *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 11 Agustus 2011. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Seri D. Surabaya
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 22 November 2013. Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 3. Banyuwangi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019. *Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro di Banyuwangi*. 23 Januari 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 1. Banyuwangi

SKRIPSI

- Dinari, S. P. 2017. *Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Jember Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Batik Sumberjambe*. Skripsi. Jember: Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.

- Aprilian, D.S. 2015. Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG DESA) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkug Kabupaten Lumajang Tahun 2015. *Skripsi*. Jember: Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.
- Fanani, Y.H. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Jember: Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.
- Nisa, K. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberagung Dalam Memanfaatkan Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Pulomerah Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Jember: Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.
- Rahman, D.K. 2015. Pengaruh Kreativitas dan Perilaku Inovatif Terhadap Keberhasilan Usaha Industri Kecil Melalui Motivasi Usaha Sebagai Variabel Mediasi (Studi kasus pada pengusaha UKM kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi). *Skripsi*. Jember: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember.
- Kusniati, Ira. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Skripsi*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri.
- Nurmayanti. 2018. Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kel. Sallotulue Kec. Wara Timur Kota Palopo. *Skripsi*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri.

DOKUMEN LAIN

- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 2015. *Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2016-2021*. Banyuwangi: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

JURNAL

- Widjanarko, B. 2007. Deregulasi Usaha Mikro Kecil Menengah Suatu Solusi Meningkatkan Perekonomian Rakyat Pasca Krisis. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. 5 (2):260-264.
- Wahyuni, Dinar. 2018. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal masalah-masalah sosial*. 9 (1): 87.

WEBSITE

[Http://Bali.Tribunnews.com](http://Bali.Tribunnews.com) (diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 06.00 WIB).

[Https://www.bps.go.id](https://www.bps.go.id) (diakses pada tanggal 4 Februari 2019 pukul 12.11 WIB).

<https://www.materipelajaran.web.id/2015/01/pengertian-kerajinan-tangan.html>
(diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 08.26 WIB).

Simy. 2017. Kendala Pemberdayaan UKM di Indonesia yang Harus Diatasi. <https://medium.com/@freshimy/kendala-pemberdayaan-ukm-di-indonesia-yang-harus-diatasi-d71ec316dafa> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 06.00 WIB).

Priyatna, 2008. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pengukuran Keberdayaan Komunitas Lokal. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/19450503197109_1-MUHAMMAD_KOSIM_SIRODJUDIN/PM.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/19450503197109_1-MUHAMMAD_KOSIM_SIRODJUDIN/PM.pdf) (diakses pada tanggal 2 September 2019 pukul 8.15 WIB).

LAMPIRAN

Produk Kerajinan Anyaman Bambu Desa Gintangan



Foto Pelatihan Pemasaran *Online* UMKM Kerajinan Anyaman Bambu Desa Gintangan



Foto Pelatihan Pembuatan Anyaman di UMKM Kerajinan Anyaman Bambu Desa Gintangan



Foto Kegiatan Gintangan Bambu Festival



Foto Kegiatan Wawancara



PEDOMAN WAWANCARA I

UMKM KERAJINAN ANYAMAN BAMBU DESA GINTANGAN

Nama Narasumber :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :
Jabatan/ Pekerjaan :

1. Bagaimana sejarah berdirinya UMKM Kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan?
2. Bagaimanakah proses produksi pembuatan anyaman bambu?
3. Berapakah hasil kerajinan yang berhasil di produksi setiap harinya ?
4. Berapakah omzet yang didapatkan dari hasil penjualan kerajinan anyaman bambu per-bulan?
5. Bagaimanakah proses pemasaran hasil kerajinan anyaman bambu?
6. Bagaimanakah perkembangan usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?
7. Apakah ada hambatan dalam proses produksi maupun penjualan kerajinan anyaman bambu?
8. Apakah ada pihak-pihak yang membantu dalam proses pemberdayaan UMKM ini?
9. Bantuan apa saja yang berhasil diberikan kepada UMKM kerajinan anyaman bambu?
10. Bagaimana kondisi UMKM sebelum dan sesudah adanya bantuan pemberdayaan?
11. Apakah harapan bagi perkembangan usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?

PEDOMAN WAWANCARA II

PEMERINTAH DESA GINTANGAN

Nama Narasumber :

Jenis Kelamin :

Umur :

Alamat :

Jabatan/ Pekerjaan :

1. Bagaimana sejarah berdirinya UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?
2. Sejak kapan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan ini terbentuk?
3. Bagaimanakah perkembangan UMKM kerajinan anyaman bambu mulai dari awal berdiri hingga saat ini?
4. Bagaimanakah sistem pemasaran hasil kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?
5. Apakah ada pihak yang membantu dalam proses pemberdayaan UMKM anyaman bambu?
6. Bantuan apa saja yang diberikan kepada UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?
7. Apakah ada hambatan dalam proses pengembangan usaha dan pemberdayaan kerajinan anyaman bambu?
8. Bagaimana kondisi UMKM sebelum dan sesudah adanya bantuan pemberdayaan?
9. Apakah harapan bagi perkembangan usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?

PEDOMAN WAWANCARA III

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Nama Narasumber :

Jenis Kelamin :

Umur :

Alamat :

Jabatan/ Pekerjaan :

1. Bagaimanakah perkembangan usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?
2. Apakah ada bantuan dalam upaya pemberdayaan UMKM kerajinan anyaman bambu?
3. Siapa saja UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan yang diberdayakan?
4. Bagaimanakah alur kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan?
5. Apakah ada fasilitasi pemasaran usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?
6. Bagaimanakah bantuan permodalan pada kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan?
7. Bagaimanakah fasilitas perizinan yang diberikan DISKOP kepada UMKM kerajinan anyaman bambu?
8. Apakah ada fasilitasi kemitraan dalam usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?
9. Bagaimanakah koordinasi dan pengendalian dengan pihak pemberdaya lain pada usaha kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?
10. Apakah ada hambatan dalam pemberdayaan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?
11. Apakah harapan bagi perkembangan usaha UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan?

TRANSKRIP WAWANCARA I

UMKM KERAJINAN ANYAMAN BAMBU DESA GINTANGAN

Nama Narasumber	: Suparti (Cindy Ayu Handycraft)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 46 tahun
Alamat	: Desa Gintangan

Sabtu, 27 April 2019

H: “sejarah awal kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan?”

S: “dahulu di tahun 80’an kerajinan anyaman gak kayak gini, itu Cuma ada welasah, irig, kukusan. Trus berkembang jadi tempat nasi. Trus di tahun 90’an pihak disperindag memberikan pogram pemberdayaan. pada tahun 1993 pemasaran sudah ke Bali namun tanpa bantuan dinas. Karena ada pergantian kepemimpinan di disperindag, dan juga UMKM di desa makin berkembang, jadi campur tangan pemerintah makin berkurang.”

H: “waktu itu pelatihan yang diberikan apa aja bu?”

S: “dahulu pelatihan awal membuat anyaman. Namun kita bukan jadi peserta, melainkan jadi narasumbernya atau pelatihnya. Tujuannya untuk melatih tenaga kerja yang masih pemula.”

H: “sekarang sedang tidak produksi bu?”

S: “saya produksi sudah tidak seperti dulu lagi, karena memang kekurangan tenaga kerj. Sekarang muda-mudi di Desa Gintangan sudah berkurang minatnya untuk mau mengayam, mereka lebih memilih untuk bekerja di luar, akibatnya produksi berkurang karena kurangnya tenaga kerja kurang.”

H: “bahan baku dari mana di dapat bu?”

S: “kalau bambu dari Setail.”

H: “untuk dapat bambu ini seminggu sekali kah atau bagaimana bu?”

S: “sesuai kebutuhan.”

H: “bahan bakunya apa aja bu?”

S: “**ada bambu bahan bakunya, rotan untuk tambahan, lem, H202 (pemutih), pendukung lain kain tile, batok, dsb.**”

H: “untuk harga nya kisaran berapa bu?”

S: “**untuk harga di toko saya mulai 20 ribu sampai 250 ribu.**”

H: "untuk kerajinan mampu di produksi berapa biji per minggu?"

S: "tergantung mereka pesan dengan waktu yang sudah ditentukan di awal."

H: "kemudian untuk omzetnya berapa bu?"

S: "pekerjaan saya itu kan pribadi, jadi saya tidak pernah menghitung penghasilan, nota pun kadang tidak saya pakai. kira-kira 10jt perbulan."

H: "kalau proses pemasaran gimana bu?"

S: "oh iya, sekarang online kan ya. Tapi saya masih tidak pakai itu, ada media nya tapi tidak di gunakan secara maksimal. Saya lebih ke manual."

H: "biasanya kalau pemasaran sudah kemana saja bu?"

S: "bali, Gresik, dan daerah-daerah lain. Bahkan orang-orang sini juga pesannya ke saya tapi dikirim lagi ke Bali. Jadi saya itu gak tau produk saya itu sudah ke mana saja."

H: "kalau hambatannya bu, gimana itu?"

S: "**hambatan ya, biasanya cuaca. Kalau lagi pesanan banyak, jadi repot buat ngeringin. Lem nya juga nanti lama buat ngeringinnya kalau hujan. Akibatnya molor produksinya. Selain itu, tenaga kerja yang kurang jadi hambatan.**"

H: "harapan ibu untuk perkembangan UMKM desa kedepannya gimana?"

S: "saya sudah sering minta regenerasi tenaga kerja, tapi tidak ada tanggapan dari dinas. Sudah mengajukan beberapa kali, tapi tetap tidak ada tanggapan. Sebenarnya saya tau dinas itu ada biaya, tapi ndak tau malah di berikan di sentra lain."

Jumat, 3 Mei 2019

H: "sejak kapan bu usaha ibu ini tidak mendapat kegiatan pemberdayaan?"

S: "sudah sejak lama, pokok saya itu terakhir dapat tahun 1997. Setelah itu sudah tidak dapat lagi."

H: "kira-kira bu menurut ibu kok bisa tidak dapat bagaimana?"

S: "kurang tau ya, kalau dulu kegiatan pemberdayaan itu kan diberikan oleh DISPERINDAG. Dan tamu yang datang itu rata-rata karena arahan dari DISPERINDAG. Tapi setelah tahun 1997 sudah tidak dapat lagi."

H: "kalau komunikasi dari DISKOP dengan ibu bagaimana bu?"

S: "tidak ada, kunjungan ya tidak ada."

H: “selama ini bu, untuk strategi pemasaran usaha ibu ini memang usaha sendiri atau ada campur tangan dari pihak lain.”

S: “sendiri, memang murni sendiri. Dari Desa pun tidak ada. Tapi memang untuk usaha kerajinan ini di akui oleh desa. Tapi tidak ada kegiatan pemberdayaan atau bantuan apapun. Sekarang ini kan siapa yang dekat dengan mereka, ya mereka yang dapat. Kalau kita yang jauh ya udah”

Nama Narasumber	: Wiwik (Wiwik Handycraft)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 47 tahun
Alamat	: Desa Gintangan

Sabtu, 27 April 2019

H: “ proses produksinya bagaimana bu?”

W: “**panjang sekali, mulai dari dipotong bambu, di raut, di bawati, jemur, di buat anyaman.**”

H: “bambu ini di dapatkan dari mana bu?”

W: “Setail.”

H: “untuk dapat bambu nya ini seminggu sekali atau sesuai kebutuhan?”

W: “sesuai kebutuhan orang setail penjual bambu bawa bambu ke sini, liburnya hari Jumat aja. Sudah ada pedagangnya.”

H: “jenis anyaman yang di buat apa saja bu?”

W: “ **banyak sekali, tempat buah, kotak tisu, parsel, alat pancing, banyak sekali kegunaanya.**”

H: “Kalau setiap hari mampu di produksi berapa biji?”

W: “kalau sehari aja gak mampu, soalnya kita harus potong-potong dan dikeringkan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu lama. Seminggu Insha Allah 5 produk, tergantung jenis produk yang kita buat.”

H: “alat nya yang di pakai apa aja bu?”

W: “**pisau, gunting, gergaji, meteran, lem.**”

H: “untuk harganya kisaran dari berapa bu?”

W: “ mulai dari 15ribu- 300ribu.”

H: “proses pemasarannya bagaimana bu?”

W: “tergantung ada pemesanan, secara manual.”

H: “kalau hambatannya bagaimana bu?”

W: **“ketika bahan baku habis, dan musim hujan. Kekurangan tenaga kerja.”**

H: “selama ini ibu pernah dapat kegiatan pemberdayaan apa tidak bu?”

W: **“belum pernah. Murni usaha sendiri.”**

H: “harapannya untuk perkembangan UMKM disini bagaimana bu?”

W: “ya ada bantuan dari pemerintah untuk dapat mengembangkan UMKM ini.”

Jumat, 3 Mei 2019

H: **“apakah di usaha ibu ini mendapat kegiatan pemberdayaan?”**

W: **“tidak”**

H: **“sejak awal berdiri apakah memang tidak pernah mendapat kegiatan pemberdayaan bu?”**

W: **“tidak pernah”**

H: **“alasanya apa bu kira2?”**

W: **“tidak tahu ya, mungkin karena usaha kecil-kecilan itu”**

H: “ini kan sudah 3 tahun berjalan nggeh bu untuk usaha ibu. Selama ini untuk pengembangan usaha berarti masih usaha sendiri ya? Tidak ada campur tangan pihak lain?”

W: “iya, masih usaha sendiri”

Nama Narasumber	: Untung (Aulia Handycraft)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 47 tahun
Alamat	: Desa Gintangan

Selasa, 28 Mei 2019

H :”jenis usahanya apa saja pak?”

U: “disini hanya usaha kerajinan songkok saja mbak.”

H: “kenapa hanya jenis songkok saja pak?”

U: “nah gini mbak, jadi ada beberapa kendala sebenarnya, sehingga usaha saya jadi hanya berfokus pada jenis songkok saja. Awalnya Cuma coba-coba ternyata kok sampai saat ini menguntungkan. Dulunya pegawai saya banyak yang keluar masuk, gak betah gitu mbak. Berawal dari situ saya buat kerajinan songkok yang bisa menguntungkan mereka.”

H: “proses produksinya bagaimana pak?”

U: **“di irat, di warna baru di anyam. Nah yang mengerjakan anyam ini ibu-ibu di sini.”**

H: “bahan bakunya di dapat dari mana pak?”

U: “bahan baku dari desa sebelah. Seperti Sempu dan Wadung. 3 hari sekali mereka datang kesini.”

H: “untuk hasil kerajinan sehari mampu hasilkan berapa biji pak?”

U: “untuk sehari dihasilkan 100 biji mengacu jumlah pegawai yang ada.”

H: “untuk pemasaran bagaimana pak?”

U: “untuk pemasaran ini ada online dan juga offline. Kalau online bisa lewat wa atau fb. Untuk offline nya kita ada reseller.”

H: “untuk perkembangan usaha bagaimana pak?”

U: “saya merintis mulai tahun 200. Sejak perintisan baru ada perkembangan yang signifikan mulai tahun 2016. Jadi sebelumnya ya jatuh bangun mbak.”

H: “untuk hambatan yang ditemukan apa saja pak?”

U: “untuk hambatan kalau bulan puasa gini, ibu-ibu lebih memilih membuat kue. Mungkin menurut mereka lebih menjanjikan. Hambatan lainnya cuaca yang berpengaruh cara mengatasinya ya kita buat oven.”

H: “di usaha bapak ini, Aulia Handycraft apa ada pihak yang membantu dalam proses pemberdayaan?”

U: “ada dari DISKOP, DISPERINDAG, dan DISPORA.”

H: **“bentuk pemberdayaannya seperti apa pak secara spesifik?”**

U: **“seperti pelatihan manajemen produksi di DISPORA, proses produksi di DISPERINDAG, pelatihan pemasaran di DISKOP UM dan fasilitas pameran-pameran seperti itu.”**

H: “ini setiap tahun kah apa bagaimana pak?”

U: “bergelir sih dengan UMKM lain.”

H: “terakhir dilaksanakan pemberdayaan ini kapan pak kira-kira?”

U: “udah lama banget sih, sekitar tahun 2013 terakhir.”

H: **“hasil yang di dapat dar adanya pemberdayaan ini apa pak?”**

U: **“ya peningkatan kesejahteraan, bisnis lebih tertata.”**

H: “berarti untuk pengembangan usaha masih ada campur tangan dari pemerintah ya pak?”

U: “iya, bisa dikatan seperti itu.”

Nama Narasumber	: Amanto (Karya Nyata Handycraft)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 50 tahun
Alamat	: Desa Gintangan

Sabtu, 27 April 2019

H: “proses produksi pembuatan anyaman bambu bagaimana pak?”

A: **“pertama bahan baku dari bambu, dipotong 1 atau 2 ruas. Kemudian di belah dan diirat menurut ukuran, di jemur, di haluskan baru di anyam berbentuk lembaran-lembaran. Bentuk anyaman yang ingin di warna sebelum di lakukan proses anyam, belahan bambu tipis di warna sesuai selera, kemudian di anyam. Kegiatan mengayam biasa dilakukan ibu-ibu rumah tangga, sedangkan perakitan barang jadinya dilakukan mas-mas atau bapak-bapak di Desa Gintangan ini.”**

H: “bahan baku di dapatkan di daerah mana pak?”

A: “sempu”

H: “hambatannya apa pak yang ditemui selama proses produksi?”

A: **“salah satunya tenaga kerja yang kurang, karena pemuda-pemuda di sini sekarang kurang meminati pekerjaan anyaman ini, terlebih ketika mereka sudah menikah kebanyakan berhenti bekerja dan mencari pekerjaan lain. Hambatan lain ada di cuaca ketika hujan.”**

H: “ada pihak yang membantu kegiatan pemberdayaan?”

A: “ada kepala desa dan instansi terkait. Kalau dulu memang ada mbak, pelatihan-pelatihan gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada, jadi berusaha sendiri.”

H: “instansi ini siapa saja pak yang di maksud?”

A: “ada dari disperindag, dahulu kan disperindag dan diskop ini jadi satu mbak, dan yang mengurus terkait UMKM ini disperindag. Saat ini di pecah fokusnya di

bagi dan muncul diskop yang memiliki kewajiban dan wewenang fokus pada UMKM. Ada dari PLN, BUMN, tapi itu dulu mbak keadaannya. Saat ini saya lagi nol, berusaha sendiri.”

H: “**bentuk partisipasi dalam festival gintangan bagaimana pak?**”

A: “**semua yang berkaitan dengan kerajinan anyaman bambu di sini mbak, entah barang-barang kerajinan ataupun kostum yang terbuat dari bambu.**”

H: “harapannya bagi perkembangan anyaman bambu ini bagaimana pak?”

A: “ya semoga kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan ini makin maju mbak, makin berkembang. Harapan lain semoga pemerintah ini tidak putus asa terus membantu perkembangan UMKM di Desa Gintangan. karena begini mbak, UMKM di sini kan peninggalan nenek moyang dahulu, jadi harus terus di lestarikan, di pertahankan keberadaannya.”

Jumat, 3 mei 2019

H: “apakah di usaha bapak ini mendapat kegiatan pemberdayaan pak? Khususnya dari DISKOP.”

A: “belum mbak, saya belum tersentuh DISKOP.”

H: “untuk strategi pengembangan usaha bapak berarti memang murni usaha sendiri atau ada campur tangan pihak lain pak?”

A: “murni usaha sendiri mbak. Pemerintah juga ikut, dahulu. Ya saya tidak mau melupakan bantuan dari pemerintah mbak. Tapi keadaannya dahulu. Sekarang murni usaha sendiri.”

H: “kemudian dari desa bagaimana pak?”

A: “mendukung mbak. Kalau ada tamu pengrajin ini jua digerakan.”

Nama Narasumber	: Bayu (Widya Handycraft)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 29 tahun
Alamat	: Desa Gintangan

Sabtu, 27 April 2019

H: “sejarah awal adanya UMKM di Desa Gintangan ini gimana mas?”

B: “sejarah awal berdirinya ini memang masyarakatnya punya keahlian membuat kerajinan, namun kerajinan yang dibuat produk alat dapur. Setelah itu pemasarannya masih sederhana, jadi mereka produksi di ambil oleh tengkulak atau langsung di jual di pasar. Berlanjut mereka dapat pelatihan, salah satu pengrajin di desa gintangan ini mendapat pelatihan, di fasilitasi oleh dinas.

Dibawa ke daerah Jawa Tengah, kemudian berkembang ide-ide kerajinan hingga saat ini. Akhirnya pemuda-pemuda ini juga pengen belajar, membutuhkan pekerjaan, yang kemudian munculah para wirausahawan yang menampung teman pemuda dalam sanggar, kalau dulu sanggar namanya. Kemudian muncul UMKM di Desa Gintangan ini.”

H: “kalau proses produksinya ini gimana mas?”

B: **“proses produksi berbagai macam jenis kerajinan ini memang dari bambu, awalnya itu proses ada 3 fase. Yang pertama membuat anyaman berupa lembaran yang dipakai dindingnya, yang kedua membuat kerangka, yang ketiga baru merangkai lembaran anyaman dengan kerangka tersebut menjadi barang jadi.”**

H: “ini kan bahan bakunya dari bambu atau ada campuran lain?”

B: “bahan baku dari bambu mbak, tapi ada tambahan bahan-bahan lain seperti kayu dan rotan tapi ini cuma sebagai pelengkap dan pemanis saja.”

H: “nah pemasokan bambu ini setiap seminggu sekali atau sesuai kebutuhan saja?”

B: “kalau untuk usaha saya, setiap 2-3 hari kita dapat kiriman bambu sebanyak 4 bambu yang sudah dipotong masing-masing menjadi 2 ruas.”

H: “terus alat yang digunakan apa aja mas?”

B: **“alat yang digunakan karena masih manual semua anatara lain, pisau, gunting, parang, gergaji dan bor biasanya.”**

H: “hasil kerajinan yang mampu di produksi kira-kira berapa?”

B: “hampir 500 produk per bulan. Kalau per hari kira-kira 50 produk.”

H: “kalau omzet kira-kira berapa mas?”

B: “kalau omzet kira-kira 20-40 jt perbulan.”

H: “kalau proses pemasaran gimana mas?”

B: “proses pemasaran kita ada showroom, yang memang sejak lama. Untuk wilayah Banyuwangi kita promosi melalui event-event pameran, event kabupaten. Dan alhamdulillah saat ini yang sedang ramai pemesanan online. Jadi lewat rekan yang mempunyai keinginan untuk menjadi reseller, dropshiper, itu kita bantu.”

H: “biasanya apa aja produk-produk yang dipasarkan di luar negeri itu?”

B: “kalau produk yang kita terima berupa kontrak. Jadi kalau ada sampel itu kita kerjakan. Jenisnya misal tempat baju kotor, ada box buah, gelas, tempat parfum, terakhir bambu mau dikirim ke maldives.”

H: “kalau pemesanan luar negeri ini biasanya dilakukan perusahaan atau rumahan gitu mas?”

B: “biasanya perusahaan mbak, kontraktor. Jadi memang disana mereka sudah ada proyek, kita produsen dapat orderan ini.”

H: “kalau hambatan dalam proses produksi ini apa aja mas?”

B: “hambatannya musiman mbak, di kala musim hujan produk bambu rentan terhadap jamur, biasanya ada nonor, ya tinggal perawatannya. Kalau hal-hal lain kayaknya tidak ada.”

H: “kalau pas musim hujan gitu biasanya cara mengatasinya gimana?”

B: “kita sedia oven bambu, lebih ekstra merawat produk dan juga finishing yang bagus akan menghambat serapan hawa dingin.”

H: “kalau disini ada pihak yang membantu proses pemberdayaan ndak mas?”

B: “sebenarnya banyak mbak, disini mulai dari desa, kecamatan maupun kabupaten banyak sekali yang membantu. Pihak swasta juga membantu proses pemberdayaannya. Juga jadi jujugan studi seperti smean ini juga membantu promosi kami, dan membantu pengembangan manajemen usaha kami.”

H: “**kalau dari DISKOP juga membantu proses pemberdayaannya apa tidak mas?**”

B: “iya membantu, kalau dulu kan DISPERINDAG, sekarang untuk UMKM nya di alihkan ke DISKOP sehingga lebih fokus. Dari DISKOP juga banyak mengikutsertakan kami melalui event-event luar daerah sampai ke luar negeri produk kami juga mewakili.”

H: “nah biasanya dari DISKOP bantuan apa saja yang diberikan?”

B: “biasanya pelatihan, kemitraan, promosi, pemasaran melalui program-program yang melalui lintas instansi. Kemaren dari stikom yang memberikan pelatihan software untuk pengelolaan usaha, trus ada juga bantuan alat juga diberika secara gantian mungkin. Trus kalau keuangan menjamin kemitraan kami melalui perbankan.”

H: “kalau pelatihan usaha yang dimaksud tadi, ini pelatihan usaha bentuknya bagaimana?”

B: “kalau untuk kami manajemen usaha juga mbak, karena keahlian kan sudah punya, jadi tinggal pengelolaan usahanya mulai dari pemasaran, produksi, packaging.”

H: “untuk bantuan kemitraan tadi, berupa bagaimana mas?”

B: **“kita di fasilitasi biasanya kemudahan mengakses perbankan, jadi lebih ringan, prosedur juga di per mudah.”**

H: **“kalau pemasaran lewat event tadi?”**

B: **“iya event, kalau di banyuwangi kan ada aplikasi banyuwangi- mall.”**

H: **“harapan untuk UMKM di Desa Gintangan ini bagaimana? Secara khusus usaha milik sendiri maupun keseluruhan.”**

B: **“untuk UMKM saya, kami alhamdulillah sudah maksimal dari dinas maupun pemerintah kabupaten banyuwangi, ada harapan kami agar bisa menular ke temen-temen UMKM lain. Dan juga banyak bermunculan wirausahawan baru.”**

Jumat, 3 mei 2019

H: **“terakhir kali pemberdayaan yang diberikan oleh DISKOP ini apa saja?”**

B: **“mereka inikan sistemnya continue ya mbak, jadi setiap bulan pasti ada kunjungan dari DISKOP istilahnya evaluasi dan pembinaan seperti itu, jadwalnya tentu saja mereka yang tau.”**

H: **“sejak kapan pemberdayaan ini di dapatkan?”**

B: **“sudah lama ya mbk, tahun nya kurang paham.”**

H: **“untuk selama ini komunikasi dengan pihak pemberdaya DISKOP bagaimana?”**

B: **“ya lewat WA, sosial media maupun kunjungan setiap bulannya. Dan di DISKOP ini kan ada rumah kreatif memang untuk memfasilitasi UMKM DI Banyuwangi, jadi terkadang kita kesana untuk konsultasi jika ada kendala.”**

H: **“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi pelaku UMKM dalam bidang pemasaran melalui Banyuwangi-mall nih, bagaimana menurut mas bayu dan apa dalam usaha ini juga ikut gabung di dalamnya?”**

B: **“iya ikut. Media pemasaran.”**

H: **“keuntungan dapat kegiatan pemberdayaan ini apa saja.”**

B: **“keuntungannya ya banyak mbak, selain dari manajerial usahanya, kemudian segi promosi produk juga lancar. Karena mereka kan juga ada link ke tamu-tamu jadi bantu romosi juga.**

TRANSKRIP WAWANCARA II
PEMERINTAH DESA GINTANGAN

Nama Narasumber	: Bastomi
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 52 tahun
Alamat	: Desa Gintangan
Jabatan	: Sekdes

Jumat, 3 Mei 2019

H: “perkembangan UMKM kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan gimana?”

B: **“untuk perkembangan ya cukup bagus, kita kenalkan lewat festival bambu gintangan itu.”**

H: “untuk pemasarannya gimana pak?”

B: “untuk pemasan pembeli datang sendiri kesini.”

H: “apakah ada pihak yang membantu proses pemberdayaannya?”

B: “iya mbak, dari DISPERINDAG, DISKOP maupun DISPAR. Nah biasanya bantuan pemberdayaan itu langsung pada UMKM nya mbak.”

H: “bantuan apa saja yang sudah diberikan?”

B: **“pelatihan-pelatihan mbak. Berupa pelatihan pemasaran maupun manajerial.”**

H: “hambatannya dalam pengembangan UMKM kerajinan anyaman bambu ini bagaimana pak?”

B: **“Tenaga kerjanya kurang mbak, selain itu daya tarik untuk menekuni pekerjaan ini juga semaki berkurang.”**

Nama Narasumber	: Rusdianah, A.md., Pd
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 50 tahun
Alamat	: Desa Gintangan
Jabatan	: Kepala Desa

Hilda: “awal mula ada kerajinan bambu disini bagaimana bu?”

Kades : **“kerajinan bambu gintangan dulu nama gintangan itu “gintangan atau gontangan” yang lama-lama jadi gintangan. Itu awalnya memang dulu daerah ini daerah yang tandus, kering sehingga nenek moyang kita yang**

namanya Sulung Agung itu mencari air ke kaligung dengan membawa gontang (mambu yang dipotong-potong diisi air) dipikul. Waktu itu memang tradisional sih kayak alat rumah tangga terbuat dari mambu, irik, welasah, tenong.. produk-produk itu dulu nenek moyang kia memproduksi.. kemudian tampah untuk memisahkan beras..kemudian lama kelamaan dimodif-modif. Kalau dulu seperti itu sekarang produk-produk kursi makan, kursi tamu, dipan, cermin semuanya produksi dari bambu.”

Hilda:”kemudian untuk sistem pemasarannya bagaimana bu?”

Kades :” online, ya sekarang kan online mbak.”

Hilda:”kemudian saya denger-denger pemasarannya sudah mencapai ekspor ya bu? Ini dari saah satu pengepul atau keseluruhan seperti itu ?”

Kades :”pengepul”

Hilda :”kemudian apakah ada pihak-pihak dalam proses pengembangannya?”

Kades :”ya pihak-pihak yang struktural kayak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.. terkait dengan pembinaan, pelatihan”

Hilda :”biasanya pelatihan apa bu yang diberikan?”

Kades :”inovasi untuk produksi anyaman bambu.”

Hilda:”pelatihan untuk produksi, pemasaran kira-kira bagaimana bu?”

Kades :”iya, membantu. Branding-branding kayak apa sih biar gak monoton modelnya kayak ada tamu biar nuansanya baru, motifnya baru, inovasinya baru.”

Hilda :”tadi ada pelatihan juga, kira-kira untuk bantuan permodalan apakah ada bantuan dari dinas-dinas terkait bu?”

Kades :”ndak ada, cuman bantuan peltihan, pembinaan, dan cara memasarkan.”

Hilda :”disini kan juga diadakan festival bambu ya bu, itu bagaimana menurut ibu?”

Kades :”festival bambu itu kan tujuannya menunjukkan satu betapa kayanya UMKM di Gintangan ini, yang kedua Desa Gintangan supaya lebih terkenal. Artinya begini, Gintangan ini kan mayoritas penduduknya petani, tetapi tidak menutup kemungkinan ditunjang dari UMKM yang lain, yang monoton atau yang maksimal yaitu bambu kerajinan, juga ada kerajinan batik, monte, banyak lah. Tapi yang mayoritas yang kita galih potensinya menurut pendataan itu bambu mbak. Jadi kita tonjolkan potensi desa kita anyaman bambu sesuai dengan sejarah tadi. Biar lebih terkenal juga menunjukkan kekayaan seni, budaya dan UMKM itu tadi.”

Hilda:”nah bu terakhir, kira-kira harapan bagi perkembangan untuk anyaman bambu disini bagaimana ?”

Kades :”menjadi desa yang mandiri, juga meningkatkan PADes. Bagaimana juga nanti menjadi usaha bersama milik desa. Kita buat kan perdes tentang retribusi satu tahun itu berapa..”



TRANSKRIP WAWANCARA III

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Nama Narasumber	: Vina
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 30 tahun
Alamat	: -
Jabatan	: Staf bagian usaha mikro

Senin, 20 Mei 2019

H: “apakah benar DISKOP memberikan bantuan pemberdayaan kepada UMKM di Gintangan?”

V: “iya benar. Sebenarnya gini mbak, tupoksi daripada DISKOP ini yaitu melakukan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan dan pengembangan. Sebenarnya tidak hanya ada di Gintangan. Di setiap kecamatan mengadakan pelatihan untuk menumbuhkan wirausahawan baru, termasuk ada di Gintangan. Nah di Gintangan ini kan ada UMKM yang memang sudah lama, dan ada juga yang baru tumbuh, maka tugas DISKOP yaitu untuk membina menjadi wirausahawan baru. contohnya misal disana sudah ada pengrajin bambu, jadi bagaimana peningkatan kualitas produk. Jadi disana pelatihannya juga membuat anyamannya. Kalau berkaitan dengan penumbuhan wirausahawan baru, disana kan banyak pengusaha bambu ya mbak, untuk memenuhi target otomatis butuh pengrajin yang kompeten. Nah nanti tugasnya dinas tidak hanya pelatihan bambu saja, tapi juga dilihat dari usulan desanya. Kebanyakan disana kan sudah tumbuh wirausahanya, jadi dari DISKOP hanya memberi fasilitas saja berupa pelatihan pengembangan.fasilitasnya bisa berupa promosi tingkat lokal maupun regional, untuk pemasarannya ada 2, yaitu online dan juga offline.

H: “itu tadi berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaannya ya mbak, bentuk lainnya seperti apa?”

V: “bentuknya ya itu, kalau untuk bantuan modal tidak. DISKOP tidak memberikan bantuan permodalan, hanya memberi fasilitas jika terdapat UMKM yang mengalami kendala di bagian modal kemudian DISKOP memberikan bantuan dengan mengarahkan dengan bank. Di DISKOP ini juga ada klinik UM, jadi UMKM yang memiliki masalah, bisa di konsultasikan ke sini, jadi nanti kita identifikasi untuk dicari solusi pemecahan masalahnya.”

H: “UMKM di Gintangan UMKM mana saja mbak yang sudah diberdayakan?”

V: “iya ya termasuk Widya Handycraft dan Aulia Handycraft.”

H: “untuk fasilitas kemitraan bagaimana mbak?”

V: “kalau untuk kemitraan kita pernah dengan poliwangi mbak, tapi entah tidak berkembang. Kalau mitra nya sih biasanya tergantung per UMKM nya beda-beda mbak.”

H: “pemberdayaan yang dilakukan di Gintangan ini kan tidak hanya dilakukan oleh DISKOP ya mbak, ada beberapa pihak lain yang melakukan pemberdayaan. nah apakah DISKOP ada koordinasi dengan pihak pemberdaya lain, jika ada seperti apa bentuk koordinasinya?”

V: **“jadi gini mbak, pelatihan ini ya. Usulan tiap desa berbeda-beda. Semisal Desa Gintangan, ngusulin pelatihan anyaman untuk pemuda, nanti acc nya di dinas pemuda dan olahraga, nanti misal desa mengusulkan pembuatan kue kering, nah nanti acc nya di DISKOP da seterusnya. Jadi gak semena-mena DISKOP yang tiba-tiba ke Gintangan memberi pelatihan.”**

H: “komunikasi yang dijalin dengan UMKM yang mendapat pemberdayaan gimana mbak?”

V: **“komunikainya ya ketika ada pameran, sering kita kontak. Kalau kunjungan tentu mbak, kan ada bentuk pendampingan, jadi sering kita dampingi untuk evaluasi.”**

H: “kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ini mbak, sifanya program saja artinya ketika programnya selesai ya sudah selesai begitu saja apa continue?”

V: **“continue mbak, jadi terus berkelanjutan sesuai usulan dari desa nya.”**

H: “kalau untuk fasilitas perizinan bagaimana mbak?”

V: “oh itu tugasnya DISPERINDAG.”

Kamis, 23 Mei 2019

H: “mulai adanya pemberdayaan ini tahun berapa mbak?”

V: “jadi gini mbak, adanya pemberdayan ini kan karena tupoksi dari dinas, jadi ya mulai adanya diskop mbak sudah ada pemberdayaan.”

H: “untuk alurnya adanya pemberdayaan ini bagaimana mbak?”

V: **“nah tahapannya mulai dari bawah mbak, adanya musrenbangdes yaitu usulan dari masyarakat. Kemudian dari musrenbangdes dari di lanjutkan ke tahap musrenbangcam dan berlanjut ke musrenbangkab. Nah dari musrenbangkab ini nanti di proses oleh BAPPEDA, di pilah-pilah kira-kira usulan pelatihan dari masyarakat ini nanti yang melakukan dinas koperasi atau diperindag dan beberapa dinas lain mbak.”**

H: : “nah mbak, menurut perda kab. Bwi no 11 tahun 2013 ini kan diskop memiliki kewajiban dan wewenang untuk memberdayakan umkm ya mbak, nah ini untuk pelaksanaannya tetap menunggu usulan dari masyarakat ya mbak berarti.”

V: “iya, semuanya seperti itu.”

H; “oh jadi tidak serta merta diskop langsung memberdayakan UMKM di banyuwangi ya mbak?”

V: “tidak bisa mbak, memang tahapannya seperti itu.”

H: “nah mbak, kemaren kan saya tanya pemberdayaan ii banyak dilakukan di widya handycraft, kenapa kira-kira mbak?”

V: **“nah gini mbak, bukan berarti kita hanya memilih UMKM tersebut. Tapi menurut kami, hanya widya handycraft dan aulia handycraft yang paling siap kalau ketika ada pelatihan maupun ada tamu. Karena pihak lain pun ketika melakan pemberdayaan ada syarat dan ketentuannya.”**

H: “harapannya untuk perkembangan UMKM di Desa Gintangan ini apa saja mbak?”

V: “ya pengennya UMKM ini naik popularitas. Bisa memberdayakan masyarakat sekitar.”

H: “untuk anggarannya ketika pemberdayan ini dilakukan berasal dari mana mbak?”

V: “ya dari pemerintah, dinas hanya menjalankan.”

Nama Narasumber	: Sari
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 27 tahun
Alamat	: -
Jabatan	: Staf bagian usaha mikro

Kamis, 10 Januari 2019

Penulis :”itu semuanya memang sudah ada program pemberdayaannya mbak ?”

Sari :”iya, sudah.”

Penulis :”yang Gombengsari ini memang ada salah satu brand yang diberdayakan, kayak kopi lego itu dari awal dia ada. Gak hanya Dinas Koperasi sih, ada Dinas

Pertanian dari sektor pertaniannya, biji kopinya. Trus Disperindag dari segi alat. Trus Diskop ini kemaren kan kebetulan kerjasama dengan Poliwangi. Jadi kemaren Poliwangi ada link gitu sama Korea jadi disana dikasih bantuan teknologi. Trus selain itu kita Dinas juga membantu dari event pamerannya, trus festival , pelatihan-pelatihan juga trus pemasarannya gak cukup di pameran kita juga bantu di online nya.”

Penulis :”dari saran tadi yang di rekomendasikan mana mbak?”

Sari :”anyaman sih, dia sudah sampek ekspor. Dan bagusnya dia, dia juga memberdayakan masyarakat sekitar.”

Penulis :”ini juga masuk di Banyuwangi Mall?”

Sari :”sudah.”

Penulis :”nah kalau dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro program pemberdayaan untuk UMKM kerajinan anyaman bambu di Gintangan ini gimana mbak?”

Sari :”**banyak sih,yang udah kita lakukan kayak pelatihan baik lokal, regional dan nasional. Pameran baik lokal, regional dan nasional. Selain itu kita memanfaatkan media sosial sih. Kita juga kebetulan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ada situs belanja online namanya Banyuwangi Mall, jadi lewat itu juga.**”

Penulis :”sampai saat ini masih berjalan?”

Sari :”**masih berjalan.biasanya kalau ada tamu dan minta studi UMKM biasanya kita arahkan kesana. Karena disana memang sudah membentuk cluster dan sudah ter manajemen juga.**”

**Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Jember**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 1074 /UN25.3.1/LT/2019
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

9 April 2019

Yth. Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi
Di
Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1355/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Hilda Khoiril Umroh
NIM : 150910201014
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Nias III No.19/A Sumpersari-Jember
Judul Penelitian : "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Anyaman Bambu di Desa Gintangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi"
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi
2. Kantor Desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian : 2 Bulan (15 April-20 Juni 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dr. Susanto, M.Pd.
NIP.196306161988021001

- Tembusan Yth -
1. Kepala Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kab. Banyuwangi; ✓
 2. Kepala Desa Gintangan, Banyuwangi;
 3. Dekan FISIP Universitas Jember;
 4. Mahasiswa ybs;
 5. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

**Surat Ijin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
Telepon (0333) 412343 Faks (0333) 412343
email : dpmpstp@banyuwangikab.go.id website : www.dpmpstpbwi.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 06 Mei 2019

Kepada :

Nomor : 072/ 467 /REKOM/429.113/2019 Yth. Sdr
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pengantar**
Penelitian/Survey/Research

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Banyuwangi
2. Kepala Desa Gintangan Kab. Banyuwangi

di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Tanggal : 09 April 2019
Nomor : 1355/UN25.1.2/LT/2019

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Pengantar Penelitian kepada :

Nama : Hilda Khoirul Umroh
NIM : 150910201014
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Survey/Research:

Judul : Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Anyaman Bambu di Desa Gintangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi

Tempat : 1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Banyuwangi
2. Kantor Desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi
Waktu : 2 Bulan (15 April s/d 20 Juni 2019)

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI

Sekretaris

NUR AGUS SUHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660804 199403 1 009